

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM MENINGKATKAN
PENGETAHUAN KEAGAMAAN PESERTA DIDIK MELALUI
PROGRAM *PALU KANA MAPANDE*
PERIODE 2017-2021**



Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

SAFRUDIN

NIM : 02.11.10.19.039

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan Peserta Didik Melalui Program Palu Kana Mapande Periode 2017-2021”** benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 1 September 2023



SAFRUDIN
NIM. 02.11.10.19.039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hasil penelitian tesis yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan Peserta Didik Melalui Program Palu Kana Mapande Periode 2017-2021” oleh Safrudin, NIM. 02.11.10.19.039 mahasiswa Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing I dan pembimbing II memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk disidangkan dalam seminar tertutup.

Palu, 1 September 2023 M
15 Safar 1445 H

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag
NIP. 19630101 199103 1 007

Pembimbing II



Dr. Rusdin, M.Pd
NIP. 19681215 199502 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM MENINGKATKAN
PENGETAHUAN KEAGAMAAN PESERTA DIDIK MELALUI PROGRAM
PALU KANA MAPANDE PERIODE 2017-2021**

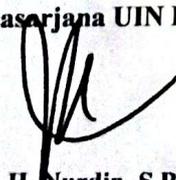
Disusun oleh:
SAFRUDIN
NIM. 02111019039

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
pada tanggal 25 Agustus 2023 M / 08 Rabiul Awal 1445 H.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag	Pembimbing I	
Dr. Rusdin, M.Pd	Pembimbing II	
Dr. Saepudin Mashuri, S.Ag., M.Pd.I	Penguji Utama I	
Dr. Mohamad Idhan, S.Ag. M.Ag.	Penguji Utama II	

Mengetahui:

**Direktur
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,**


**Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005**

**Ketua Prodi Magister
Pendidikan Agama Islam,**


**Dr. Sitti Hasnah, S.Ag., M.Pd
NIP. 19700831 200901 2 002**

KATA PENGANTAR

وَاللّٰهُ وَمَنْ وَصَّحِبِهِ اِلَيْهِ وَعَلَى ،اللّٰهُ رَسُوْلٍ عَلٰى وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ ،لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ ،اللّٰهُ بِسْمِ

Rasa syukur tak terhingga penulis haturkan kepada Allah S.W.T atas segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada penulis. Akumulasi atas kenikmatan itu, yang membuat penulis akhirnya dapat menyelesaikan tulisan ini dengan segala dinamikanya. Shalawat dan salam selalu penulis haturkan kepada Rasulullah S.A.W semoga kita semua mendapat syawaatnya di akhirat nanti. Aamiin ya rabbal alamiin.

Selesainya tulisan ini, tidak lepas dari doa, dukungan beberapa pihak yang perhatian kepada penulis untuk selalu memotivasi menyelesaikan tulisan yang menjadi syarat menyelesaikan studi pendidikan strata 2 ini.

Mereka itulah, orang-orang yang begitu berjasa kepada penulis baik dalam doanya, maupun dukungannya. Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
2. Orang tua penulis, Norma M Yunus, yang dengan tulus dan penuh kasih sayang mendidik dan mengasuh penulis dan saudara-saudara penulis dalam keadaan single parent. Almarhum Ahmadin, semoga Tuhan yang maha esa mengampuni segala dosanya dan penulis sebagai anak, semoga bisa menjadi amal jariyah baginya.

3. Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Dr. Sitti Hasnah, S.Ag., M.Pd selaku Ketua Jurusan program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Datokarama Palu.
5. Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Rusdin, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan proposal tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Asisten Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran selama masa perkuliahan.
7. Guru-guru penulis yang telah membagikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga segala amal baiknya yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri dan semoga tulisan ini bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang.

Palu, 14 Agustus 2023

Penulis

Safrudin

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penegasan Istilah	11
E. Garis-garis Besar Isi Proposal.....	15

BAB II PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori tentang Pengetahuan Keagamaan	35
C. Kajian Teori tentang Program Palu Kana Mapande.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	56
C. Kehadiran Penulis	57
D. Data dan Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Teknik Analisis Data	65
G. Pengecekan Keabsahan Data	67

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Kota Palu	69
B. Kepemimpinan di Kota Palu	72
C. Gambaran Umum Kota Palu	74
D. Pendidikan di Kota Palu	78
E. Kebijakan Palu Kana Mapande	79
F. Hasil Program Palu Kana Mapande	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	----

ABSTRAK

Nama Penulis : Safrudin
NIM : 021110019039
Judul Tesis : KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM
MENINGKATKAN PENGETAHUAN KEAGAMAAN PESERTA
DIDIK MELALUI PROGRAM *PALU KANA MAPANDE* PERIODE
2017-2021

Palu Kana Mapande menjadi program unggulan Pemerintah Kota Palu periode di bidang pendidikan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa. Dalam pelaksanaannya, program *Palu Kana Mapande* ini diterapkan di jenjang SD dan SMP.

Untuk jenjang SD yang menjadi fokus penelitian ini, program *Palu Kana Mapande* diimplementasikan dengan pelaksanaan Baca Tulis Alquran atau biasa disingkat BTQ. Sasaran program *Palu Kana Mapande* ini menysasar siswa kelas 5 SD di negeri maupun swasta yang dilaksanakan setelah selesai pembelajaran formal.

Secara umum, tujuan program *Palu Kana Mapande* ini untuk membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan membaca dan menulis Alquran serta menjadikannya bacaan utama.

Program ini sebagai intervensi pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik utamanya di bidang baca dan tulis Alquran.

Sekitar 6.000 siswa kelas V SD setiap tahun yang diwisuda setelah melakukan program *Palu Kana Mapande* ini.

Palu Kana Mapande menjadi wajib diikuti karena ada intervensi pemerintah sehingga tidak ada satu pun peserta didik kelas V yang tidak mengikuti program tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksai data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan jika program *Palu Kana Mapande* memberi dampak yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik.

Alumni yang mengikuti program *Palu Kana Mapande* ini terbukti meningkat kemampuan keagamaannya utamanya baca dan tulis Alquran.

Saran dari penulis agar programnya lebih dikembangkan dan menysasar siswa kelas lain. Sehingga ada evaluasi dilakukan pada jenjang yang sama.

Misalnya *Palu Kana Mapande* juga dilaksanakan di kelas 3 sehingga pada saat kelas 5, dapat dievaluasi hasil pelaksanaannya pada saat kelas 3.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah pada dasarnya dikeluarkan untuk kemaslahatan publik atau masyarakat. Dengan kebijakan pemerintah yang baik, pelayanan-pelayanan umum kepada masyarakat akan dirasakan manfaatnya baik itu secara langsung maupun tidak langsung di berbagai dimensi kehidupan publik.

. Kebijakan menjadi pilihan pengambil kebijakan apakah akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya. Kebijakan pemerintah merupakan kehendak untuk melakukan pengaturan atau bahkan pemaksaan dalam hal yang luas.¹

Dengan begitu, kebijakan punya pengaruh besar karena kebijakan dapat mengatur bahkan memaksa jika kebijakan itu sudah diterapkan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Sebagaimana halnya pimpinan organisasi lainnya pemimpin di pemerintahan diperhadapkan pula pada berbagai keadaan untuk bersikap proaktif dan mengandalkan kepemimpinannya yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja para bawahannya. Mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menjadi creator, innovator dan

¹ Andi Syamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung : Refika Aditama. 35

fasilitator dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepemimpinan pemerintahan dan etika pemerintah pada semua tingkat pemerintah mempunyai kedudukan strategis dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel. Pemimpin di setiap level pemerintahan diharapkan memperhatikan memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip etika pemerintahan dalam kepemimpinan pemerintahan yang dijalankannya dalam kerangka mencapai tujuan pemerintahan yang dicita-citakan.²

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan instansi pemerintah wajib mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun kebijakan-kebijakan pemerintah pusat selalu bersifat umum sehingga untuk melaksanakannya instansi pemerintah harus mengembangkan *Standard Operating Procedure* agar pelaksanaan kebijakan tersebut efektif efisien dan taat peraturan.³

SOP yang dikembangkan harus berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Kebijakan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan yang baik akan berdampak baik kepada masyarakat.

Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas hidup manusia dapat tercapai. Suatu

² M Aries Djaenuri 2015. *Kepemimpinan, Etika dan Kebijakan Pemerintahan*. Bogor : Ghalia Indonesia

³ Dadang Suwanda. Agus Purwoko. 2013. *Menyusun Standard Operating Procedure Lembaga Pemerintah: Berbasis Sistem Pengembangan Intern Pemerintah*. Jakarta : PPM

perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat pula disebut sebagai kebijakan.⁴

Sejalan dengan itu, kebijakan pemerintah harus menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari keamanan, ketertiban, sosial, ekonomi hingga pendidikan. Kaitannya dengan pendidikan, kebijakan pemerintah harus berperan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Caranya ialah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM.

Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan melalui pengalaman belajar pendidikan umum yang baik. Selain itu juga dengan dibarengi kebijakan yang mendukung peningkatan pengetahuan keagamaan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan bagi bangsa Indonesia dalam era globalisasi ini sangatlah penting karena melalui usaha pendidikan dapat menentukan keberhasilan dari semua pelaksanaan pembangunan yang dicita-citakan baik berupa pembangunan fisik, maupun mental spiritual.

Pendidikan juga merupakan syarat mutlak masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang

⁴ Muhammad Fedryansyah. *Kebijakan Sosial dalam Pembangunan*. Jurnal Neliti. Vol 6. No 1. 137. 2016

maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵

Sejalan dengan itu, pendidikan Islam juga memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Sebab dalam catatan sejarah pendidikan di Indonesia, eksistensi pendidikan Islam merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat tua dalam ikut memberi sumbangsi pembangunan bangsa ini.

Hal ini terlihat jelas hingga saat ini, dimana pendidikan Islam masih memiliki tempat yang sangat strategis sekalipun perkembangannya masih diliputi pelbagai problem.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, ada dua perbedaan mendasar. Pertama adalah pendidikan umum yang lebih menekankan pada materi-materi umum seperti Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Sejarah, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris dan berbagai materi umum lainnya, serta tetap memberikan materi pendidikan agama dalam pembelajarannya.

Lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan model seperti itu adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kedua adalah pendidikan yang berbasis keagamaan. Pendidikan seperti ini membagi materinya ke beberapa cabang pelajaran spesifik seperti Aqidah, Fikih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Alquran dan Hadis dengan tetap memberikan porsi untuk materi-materi umum.

⁵ Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Model seperti ini dijalankan pendidikan pesantren serta Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

Melihat realitas ini, lembaga pendidikan yang lebih mengedepankan materi umum dan hanya memberikan pendidikan agama secara umum kepada peserta didiknya, maka pengetahuan peserta didik terhadap pendidikan keagamaan juga tidak akan sama dengan pendidikan yang membagi materi agama lebih spesifik.

Selain itu, jam pelajaran agama yang minim secara langsung juga akan memengaruhi pengetahuan keagamaan para peserta didik.

Padahal untuk membentuk pribadi dan sikap-sikap amaliah Islam dalam pribadi manusia, baru dapat efektif jika dilakukan dengan proses pendidikan yang berjalan dengan terus-menerus dan berkesinambungan.⁶

Dahulu, ‘pertentangan’ antara pendidikan umum dan madrasah cukup tajam. Bahkan, opini-opini pro kontra antara yang memihak keduanya juga begitu tajam di sebagian masyarakat.

Bagi yang memihak pendidikan umum, menyebut madrasah sebagai lembaga pendidikan yang kumuh, kolot, tertinggal dan tidak maju. Sementara yang memihak lembaga madrasah, menyebut pendidikan umum sebagai lembaga yang menciptakan kader-kader kapitalis yang hanya mementingkan kehidupan duniawi serta sekuler dan mengeyampingkan urusan agama.

⁶ Arifin H.M, *Ilmu Pendidikan Islam*, PT Bumi Aksara , 2008, 9

Pertentangan itu mulai mereda pada tahun 1973 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.⁷ Dengan adanya SKB 3 Menteri itu, ada beberapa hal mendasar yang mengalami perubahan. Pertama, pengakuan terhadap ijazah madrasah yang memiliki kesetaraan dengan ijazah pendidikan umum. Kedua, lulusan madrasah, dapat melanjutkan studi ke pendidikan umum yang setingkat di atasnya.

Misalnya lulusan Madrasah Ibtidaiyyah bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Atau lulusan dari Madrasah Tsanawiyah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK. Ketiga yang berubah setelah adanya SKB 3 Menteri tersebut adalah, peserta didik dari Madrasah dapat pindah sekolah (mutasi) ke sekolah pendidikan umum yang setingkat.

Meski memiliki kesetaraan, namun dalam praktiknya, pendidikan umum, tetap lebih mengedepankan materi-materi pembelajaran umum dan hanya memberikan satu pelajaran agama yakni Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sedangkan Madrasah membagi materi pendidikan agama itu dalam materi-materi yang lebih spesifik.

Peningkatan pengetahuan keagamaan menjadi pendukung dalam memperbaiki kecerdasan emosional seseorang. Kecerdasan emosional yang baik akan mendukung perilaku sosial yang baik pula.

⁷ Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri) No.06/1975,037/U/1975, dan 36/1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.

Dalam konteks lokal, Pemerintah Kota Palu memberikan perhatian cukup besar dalam menumbuhkan peran pendidikan agama sebagaimana tergambar dalam visi dan misi Walikota Palu periode 2017-2021 yaitu “Kota Palu, Kota Jasa yang Beradat dan Berbudaya Dilandasi Iman dan Takwa”.

Visi ini kemudian dijabarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu. Dalam penerapannya, implementasi visi ini, dilaksanakan melalui program yang disebut *Palu Kana Mapande* atau dalam bahasa Indonesianya berarti Palu Pintar. Program *Palu Kana Mapande* merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan anak didik yang beriman dan bertakwa dengan memberikan tambahan jam belajar agama bagi peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar dalam bentuk pengajaran baca tulis Alquran.⁸

Selama pandemi Covid-19, sebagaimana pembelajaran pada umumnya, program ini juga terhenti hingga pergantian masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Hal ini juga yang membuat penulis tertarik untuk melakukan studi tentang program *Palu Kana Mapande* ini dan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Palu untuk tetap melakukan pembinaan program yang bisa meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik di Kota Palu.

Dari pengamatan awal yang penulis lakukan, sekolah mengaku pelaksanaan program *Palu Kana Mapande* melalui Tambahan Jam Pelajaran Agama atau TJPA

⁸ Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Palu (LKPJ) tahun anggaran 2016, 89.

sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik khususnya dalam hal membaca dan menulis Alquran. Hal itu diakui guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Inpres Watusampu, Sarini Hamidi, S.Pd.I. Menurut Sarini, saat tambahan jam pelajaran agama (TJPA) diterapkan dalam pembinaan Baca Tulis Quran atau BTQ, secara umum kemampuan peserta didik mengalami peningkatan.⁹

Sarini mengungkapkan, saat BTQ diterapkan di sekolah, pengetahuan peserta didik meningkat karena memiliki tambahan jam untuk belajar agama. Secara formal kata Sarini, setiap jam pelajaran agama hanya 24 jam. Sehingga menurutnya dengan adanya tambahan pelajaran agama melalui program *Palu Kana Mapande*, bisa memberikan pengalaman baru kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan keagamaan.

Terus terang waktu itu memang sangat terbantu dengan adanya BTQ. Karena saya rasakan siswa mengalami perubahan yang sangat baik dalam pengetahuan agamanya.¹⁰

Tidak hanya Sarini, guru SDN 15 Palu, Nurlian, S.Ag dan Nurhayati, S.Ag juga mengakui hal yang sama. Menurutnya, program *Palu Kana Mapande* yang diimplementasikan melalui pembinaan Baca Tulis Quran sangat memberikan manfaat kepada peserta didik.¹¹

⁹ Guru SD Inpres Watusampu, Sarini Hamidi saat ditemui di ruang guru SDN Inpres Watusampu, Selasa 14 Juni 2022

¹⁰ Guru SD Inpres Watusampu, Sarini Hamidi saat ditemui di ruang guru SDN Inpres Watusampu, Selasa 14 Juni 2022.

Terlebih lanjut Nurlian, sekolah yang berada di Jalan Soeprapto, Kota Palu itu salah satu keunggulannya adalah peserta didik menghafal Alquran khususnya juz 30. Menurutnya, saat pembinaan baca tulis Alquran dilakukan, secara langsung memperbaiki cara peserta didik dalam pengucapan atau makharijul huruf dan pengetahuan-pengetahuan baru tentang Alquran. Di SDN 15 Palu lanjut Nurlian, sebelum pembelajaran dimulai, seluruh peserta didik beragama Islam dibimbing untuk menghafal Alquran.

Sehingga saat ada program BTQ sangat sejalan pembinaannya. Di sekolah dibina hafalannya. Saat BTQ mereka mendapat tambahan jam pelajaran agama untuk lebih memperbanyak pengetahuan agamanya.¹²

Guru SDN 24 Palu, Nurhidayah, A.Ma juga mengungkapkan hal yang sama pada prinsipnya pembinaan BTQ yang merupakan program dari *Palu Kana Mapande* sangat bermanfaat bagi pembinaan baca dan tulis Alquran peserta didik.¹³

Dia menyebut saat program tersebut dilaksanakan, peserta didik terpacu untuk meningkatkan pengetahuannya karena akan dievaluasi dan dilakukan lomba antarsekolah tingkat Kota Palu. Nurhidayah menjelaskan, di sekolahnya total ada 4 pembina BTQ yang melakukan pembinaan di luar jam sekolah. Materi yang diberikan lanjutnya memiliki kurikulum tersendiri dan di luar materi agama yang

¹¹ Guru SDN 15 Palu, Nurlian S.Ag diwawancara Selasa 14 Juni 2022 di ruang Pramuka SDN 15 Palu.

¹² Guru SDN 15 Palu, Nurlian S.Ag diwawancara Selasa 14 Juni 2022 di ruang Pramuka SDN 15 Palu.

¹³Guru SDN 24 Palu, Nurhidayah, A.Ma diwawancara Selasa 14 Juni 2022 di ruang guru

disampaikan di sekolah. Namun kata Nurhidayah, program itu terhenti saat penyebaran Covid mulai meningkat hingga saat ini.

Kepala SDN 24 Palu, Sahwan, S.Pd., M.Pd menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Palu kembali merencanakan adanya pembinaan keagamaan kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam hal keagamaan.¹⁴

Sudah ada wacana Imtaq (iman dan taqwa) setiap Jumat yang akan diisi dengan Kultum dan zikir.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Palu terhadap pendidikan agama Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan *Palu Kana Mapande* dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik?
3. Bagaimana hasil program *Palu Kana Mapande* dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Kota Palu terhadap pendidikan agama Islam.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan *Palu Kana Mapande* dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik.

¹⁴ Kepala SDN 24 Palu, Sahwan diwawancarai di ruang Kepala Sekolah, Selasa 14 Juni 2022.

¹⁵ Kepala SDN 24 Palu, Sahwan diwawancarai di ruang Kepala Sekolah, Selasa 14 Juni 2022.

3. Mengidentifikasi hasil program *Palu Kana Mapande* dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan.

D. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan Peserta Didik di Kota Palu Melalui *Program Palu Kana Mapande* periode 2017-2021.

Untuk menghindari pengertian yang keliru dalam memahami judul tesis ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang menjadi kata kunci agar terhindar dari pemahaman yang keliru.

1. Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya).¹⁶

Kebijakan juga berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis besar pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.¹⁷

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 476

¹⁷*Ibid*,

Menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar untuk memperoleh pengertian dasar yang lebih luwes kita perlu mengartikan kebijakan sebagai cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk memecah masalah.¹⁸

Dalam penelitian ini, kebijakan yang penulis maksud adalah, aturan, regulasi atau perintah dari Wali Kota Palu atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Palu yang dijalankan secara umum di tingkat sekolah untuk yang berkaitan dengan meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik.

2. *Palu Kana Mapande*

Palu Kana Mapande adalah nama program kegiatan Pemerintah Kota Palu periode 2017-2021 yang melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Palu. *Palu Kana Mapande* terdiri dari tiga suku kata.

Palu yang dimaksud menunjukkan tempat atau daerah yang menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah., yang memiliki luas 395,06 kilometer persegi. Terletak pada 11 lintang selatan dan 119 45-120 1 derajat bujur timur dan dilalui garis khatulistiwa. Palu berada di sebuah lembah pada ketinggian (elevasi) 0-700 M di atas permukaan laut yang dibelah oleh sungai Palu.

Kana secara bahasa berasal dari Bahasa Kaili yang berarti “betul” atau “benar”. Selain mengandung arti betul dan benar, *Kana* juga berarti “harus”.¹⁹

¹⁸Nanang Fatta, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Cet. III, Bandung : :PT Remaja Rosdakarya Offset,2014), 3.

¹⁹Tim Penyusun Bahasa Kaili, *Kamus Bahasa Kaili Ledo-Indonesia-Inggris*, (Palu : Sehati Prima Sejahtera, 2003) 17.

Sedangkan *Mapande* berasal dari kata dasar *Pande-Napande* yang berarti “pintar”, “pandai”, “cakap”, dan “terampil”.²⁰ Sedangkan dalam penelitian ini, *Palu Kana Mapande* merupakan suatu kebijakan dari Pemerintah Kota Palu untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik. Program ini dilaksanakan di pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam praktiknya, penyebutan program *Palu Kana Mapande* biasa disebut Baca Tulis Alquran (BTQ) atau Tambahan Jam Pelajaran Agama (TJPA) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).

Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan ketiga istilah itu, tergantung dari konteksnya. Misalnya jika kaitannya dengan kebijakan yang bersifat umum, maka penyebutannya adalah *Palu Kana Mapande*.

Jika praktiknya di sekolah, kadang disebut dengan istilah BTQ atau TJPA yang maksud dari keduanya adalah sama yakni implementasi dari *Palu Kana Mapande*.

3. Pengetahuan Keagamaan

Pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian ataupun segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan hal (mata pelajaran) di sekolah.²¹ Cara memperoleh pengetahuan adalah dengan pengalaman yang dialami indera manusia.

²⁰*Ibid*

²¹Balai Pengembangan dan Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 885

Sehingga bisa dipahami bahwa pengetahuan adalah berbagai gejala atau fenomena yang ditemui manusia melalui pengamatan.

Sedangkan keagamaan ialah materi-materi keagamaan yang meliputi materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta keterampilan keagamaan seperti membaca dan menulis Alquran.

Sehingga dalam penulisan penelitian ini, pengetahuan keagamaan yang penulis maksud adalah pengetahuan yang dimiliki peserta didik baik itu dalam kaitannya dengan aqidah, akhlak, fikih, ataupun keterampilan membaca dan menulis Alquran.

4. Peserta Didik

Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah manusia yang sepanjang hidupnya selalu dalam perkembangan, peserta didik makhluk yang berada dalam perkembangan dan pertumbuhan masing-masing, mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.²²

Peserta didik adalah orang yang memiliki potensi dasar, yang perlu dikembangkan melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga maupun pendidikan di lingkungan sekolah. Dalam lingkungan keluarga seorang pendidik yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada seorang anak adalah orang tua. Sedangkan dalam lingkungan sekolah seorang pendidik yang bertanggung jawab memberikan bimbingan adalah seorang guru.²³

²²Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), 195.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud peserta didik adalah peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD yang tersebar di sekolah-sekolah pelaksana program *Palu Kana Mapande*.

E. Garis-Garis Besar Isi Tesis

Secara keseluruhan isi tesis ini berisi tiga bab, yang garis-garis besar pembahasannya mencakup:

Bab pertama (Pendahuluan). Terdiri dari latar belakang masalah yang mengandung uraian tentang hal-hal yang melatar belakangi munculnya pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam tesis ini.

Dalam bab ini, termuat dua rumusan masalah yang sesuai dengan judul tesis. Ada juga batasan masalah yang membatasi ruang lingkup pembahasan masalah yang akan dibahas dalam ini, tujuan penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi tesis.

Bab kedua (Kajian Pustaka). Membahas mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tesis untuk mencegah adanya duplikat.

Serta membahas mengenai berbagai konsep dan teori yang relevan menyangkut masalah-masalah yang ada kaitannya dengan judul tesis Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan Peserta Didik di Kota Palu.

Bab ketiga (Metode Penelitian). Sesuai dengan judul babnya, pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang penulis

²³ *Ibid*

gunakan dalam menyusun tesis, yaitu dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat (Hasil Penelitian). Pada bab ini, penulis menuliskan hasil penelitian yang telah penulis lakukan selama melakukan penelitian di beberapa sekolah dasar di Kota Palu. Penulis juga mencari alumni dari sekolah tersebut untuk mewawancarai dan melihat kemampuan mereka dalam membaca dan menulis Alquran.

Bab kelima (penutup). Bab ini merupakan penutup serta kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama 6 bulan di lokasi-lokasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini, memiliki keterkaitan dengan beberapa tulisan baik dalam bentuk jurnal maupun tesis yang telah lebih dulu ada.

Pertama, jurnal berjudul Perbandingan Pendidikan; Pemahaman Simbolis dan Substantif PAI di Madrasah dan Sekolah, kolaborasi karya Mohammad Wardi, Ismail, dan Ali Makki yang diterbitkan tahun 2019 oleh Nidhomul Haq, vol 4, no 1.

Dalam penelitian itu, para penulis menyebut bahwa alokasi waktu pelajaran agama di sekolah hanya memberikan porsi 2 jam pelajaran agama per minggu. Sedangkan pada madrasah, alokasi waktu pelajaran agama lebih lama.¹

Karena setiap sub tema pelajaran agama seperti Fikih, Alquran Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam dan Aqidah Akhlak, masing-masing memiliki waktu 2 jam pelajaran per minggu.

Sekolah bisa mengejar ketertinggalan itu bila ada kebijakan dengan memberikan porsi lebih lama pada pelajaran agama atau dengan memberikan tambahan jam pelajaran agama pada para peserta didik.

Kedua, skripsi berjudul Perbedaan Perilaku Moral dan Religius Siswa Berlatarbelakang Umum dan Siswa Berlatarbelakang Agama. Skripsi ini ditulis Fitri

¹ Mohammad Wardi, Ismail, dan Ali Makki yang diterbitkan tahun 2019 oleh Nidhomul Haq, vol 4, no 1

Awan Arif Firmansyah mahasiswa program studi Psikologi, pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2017.

Salah satu kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan Fitri Awan Arif Firmansyah itu adalah sekolah harus mempertahankan dan meningkatkan pembelajaran agama Islam dan memperingati hari-hari besar keagamaan seperti maulid Nabi dan Isra Miraj serta mendorong guru agama Islam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.²

Materi pendidikan agama Islam yang diberikan juga harus menarik perhatian peserta didik dan dikaitkan dengan perilaku kehidupan sehari-hari sehingga dapat langsung diterapkan dalam kehidupan peserta didik.

Penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian penulis ini adalah tesis berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Kota Palu, karya Rizal, mahasiswa Pascasarjana program studi Pendidikan Agama Islam, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, tahun 2017.³

Dalam penelitiannya itu, Rizal menyimpulkan bahwa program Baca Tulis Quran (BTQ) yang merupakan program Pemerintah Kota Palu di bidang pendidikan agama, belum dilaksanakan dengan maksimal mulai dari jam pelajaran yang belum tepat, kemampuan guru BTQ yang belum maksimal dan penguasaan kelas, kurangnya koordinasi guru BTQ dengan pihak sekolah, kurangnya koordinasi guru BTQ dengan

² Fitri Awan Arif Firmansyah, Skripsi berjudul *Perbedaan Perilaku Moral dan Religius Siswa Berlatarbelakang Umum dan Siswa Berlatarbelakang Agama*, Surakarta, 2017

³Rizal, Tesis berjudul *Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam*. Palu : IAIN Palu, 2017

pihak orang tua, serta minimnya alat penunjang seperti buku metode Rubaiyat untuk peserta didik yang sangat terbatas.⁴

Kebijakan secara etimologi berasal dari kata *Policy* yang berarti aturan.⁵

Sedangkan secara istilah, kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).⁶

Kebijakan berkaitan dengan langkah yang diambil seorang atasan yang akan berdampak pada suatu hal yang akan dan sedang dikerjakan.

Ilmu tentang kebijakan secara tidak langsung telah berkembang sejak lama dan dalam berbagai fase. Ilmu kebijakan ini pertama kali diterapkan untuk menerapkan peraturan-peraturan yang sah.

Dalam sejarahnya, ada tiga fase yang dikenal berkaitan dengan sejarah kebijakan. Yoyoh Bahtiar Irianto dalam bukunya *Kebijakan Pembaruan Pendidikan* menjelaskan tiga fase sejarah perkembangan kebijakan itu.

Pertama, fase abad ke-19. Pada tahap ini, dikenal ada empat sumber kebijakan.

- a. Kode Hammurabi, yaitu kode yang mengatur hak dan kewajiban dengan mencantumkan persyaratan sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakat

⁴ Rizal. Tesis berjudul *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Kota Palu*. Palu, 2017

⁵ Syafaruddin., *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta : Rineka, 2008, 75

⁶ *Ibid*

transisi Babilonia pada aspek prosedur criminal, hak milik, perdagangan, hubungan keluarga, perkawinan, dana kesehatan, pertanggungjawaban public.

- b. Paranormal, dahulu paranormal bertugas sebagai penasehat kerajaan. Dengan begitu, ramalan yang dihasilkan paranormal digunakan untuk memperbaiki kebijakan.
- c. Pengetahuan yang dispesialisasikan, pengetahuan menjadi sumber kebijakan ketika masuknya ilmu pengetahuan itu dari golongan akademisi, tokoh agama dan para pemuka.
- d. Revolusi industri, yaitu ketika mulai menggunakan pendekatan ilmiah dalam setiap pemecah masalah termasuk dalam aspek manajeen ilmiah dan analisis sistem.⁷

Berikutnya adalah fase kedua pada abad ke-19 yang ditandai dengan dimulainya uji coba penerapan ilmu pengetahuan dalam aspek kehidupan, antara lain :

- a. Pertumbuhan penelitian empiric, yaitu dengna penerapan ilmu statistic, demografi, survey yang bersifat empiris tentang masalah kemiskinan, gelandangan, penyakit dan kontrol politik.
- b. Tumbuhnya stabilitas politik yang mengakibatkan dominasi eksekutif terhadap legislative dan ketidakseimbangan pelaku-pelaku sosial ekonomi

⁷ Yoyoh Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori dan Model*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012. 31

- c. Sumber-sumber praktis pengetahuan yang dispesialisasikan, yakni pada masa pengetahuan dikemas dan dijadikan ilmu.⁸

Fase ketiga, pada abad ke 20 yang ditandai dengan semakin gencarnya gerakan implementasi ilmu pengetahuan seperti :

- a. Profesionalisasi ilmu sosial yang mengkaji masalah-masalah kebijakan dan merumuskan alternative solusinya
- b. Gerakan ilmu-ilmu kebijakan yang disumbang dari pemikiran Webber dan Mannheim, ilmu kebijakan publik merupakan bidang kajian ilmu administrasi negara, rumpun utama ilmu politik.
- c. Perspektif analycentric yaitu pembatasan masalah ke dalam bagian-bagian yang membandingkan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi
- d. Pelembagaan penelitian dan analisis kebijakan yang berupa profesionalisasi keilmuan dari aspek substansi, proses, metodologi, dan konteks melalui lembaga-lembaga advokasi.
- e. Analisis kebijakan dalam masyarakat pascaindustri yang bertujuan untuk menanggapi ekonomi akibat perang, dan reaksi terhadap pelaksanaan pemerintahan dengan ciri-ciri : pemusatan ilmu pengetahuan teoritis, kreasi teknologi intelektual, meluasnya kelas ilmu pengetahuan, perubahan dari barang ke pelayanan, instrumentalisasi ilmu, produksi dan penggunaan informasi

⁸Ibid

- f. Bimbingan teknokratik, yaitu pengetahuan yang relevan dengan kebijakan semakin langka, sehingga memerlukan peningkatan kekuasaan dan pengaruh dari analisis kebijakan untuk mengesahkan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang ril.
- g. Assesment atau penilaian, yaitu analisis kebijakan pada dasarnya tidak lepas dari proses politik yang merefleksi dinamika dan konflik nilai di lingkungan masyarakat. Karena itu, analisis kebijakan lebih bersifat politis, sehingga pengembangan analisis kebijakan bukan hanya tugas intelektual atau keilmuan semata.⁹

Defenisi kebijakan telah banyak dikemukakan para ahli. Penerapan kebijakan mencakup aspek yang sangat luas di berbagai bidang. Salah satunya seperti dikemukakan Stokey dan Zekhauser sebagaimana disadur Nanang Fattah dalam buku *Analisis Kebijakan Pendidikan*.

Stokey dan Zekhauser menyebut kebijakan adalah suatu proses rasional dengan menggunakan metode dan teknik rasional pula. Keduanya juga mempersempit makna kebijakan menjadi hanya diperuntukkan bagi para pembuat keputusan yang rasional sebagai penentu tujuan kebijakan dan yang menggunakan proses logika dalam menelusuri cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰

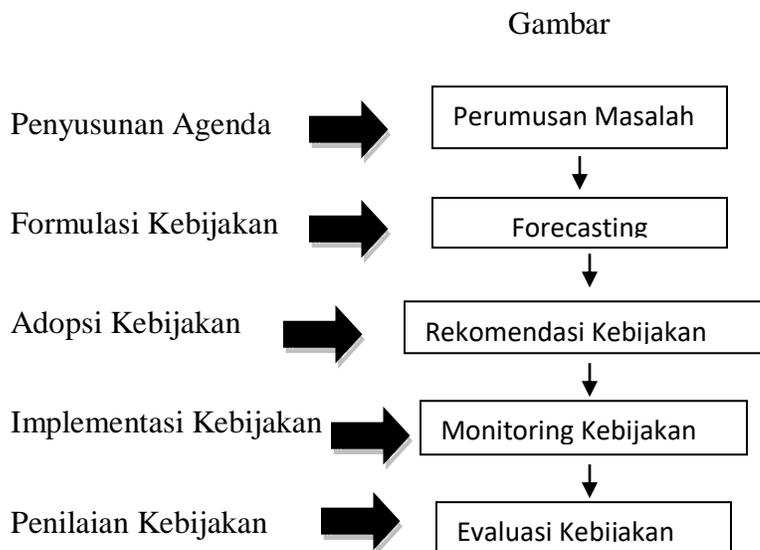
⁹Ibid, 33

¹⁰ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2014, 3

Dari pengertian itu dipahami bahwa kebijakan merupakan langkah yang diambil dengan rasional untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau pun untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dengan penerapan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat, maka langkah yang diambil akan terukur dan jelas target yang harus dicapai sehingga tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang menguntungkan.¹¹

Dalam pelaksanaannya, prosedur penyusunan kebijakan seperti berikut ini :



Kebijakan diimplementasikan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan. Implementasinya diawali dengan program, kemudian menjadi

¹¹Moekijat, *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Mandar Maju, 1995, 5

proyek dan pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan. Pola seperti ini adalah yang paling lazim diterapkan dalam pemerintahan.¹²

Implementasi kebijakan sangat diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan. Grindle mengatakan implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui seluruh birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa yang memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan suatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.¹³

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, Van Meter dan Van Horn menjelaskan ada enam variabel yang digunakan, yakni :

1. Standar dan tujuan pendidikan
2. Sumber daya
3. Komunikasi
4. Interorganisasi dan aktivitas penguatan
5. Karakteristik agen pelaksana
6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.¹⁴

Charles O Jones yang mendasarkan diri pada konsepsi aktivitas fungsional berpendapat bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan tiga pilar.

¹² *Ibid*

¹³ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 132

¹⁴ *Ibid*

- a. Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjalankan program agar dapat berjalan
- b. Interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
- c. Aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.¹⁵

Penjelasan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan James E. Anderson yang mengatakan implementasi kebijakan mencakup pada empat aspek, yakni :

- a. Personel yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Esensi prosos administrasi
- c. Kepatuhan terhadap kebijakan
- d. Pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.¹⁶

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang dilakukan setelah kebijakan disahkan. Merilee S Grindle dalam buku berjudul *Politics and Policy Implementation in The Third World* menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan bergantung pada kondisi tiga komponen variable sumber daya implementasi yang diperlukan.

Ketiga komponen itu adalah

- a. Content of Policy Message
 1. Ketersediaan dana dan sumber lain untuk melaksanakan kebijakan
 2. Adanya sanksi
 3. Tingkat kesukaran masalah kebijakan
- b. Kredibilitas pesan kebijakan

¹⁵Ibid, 133

¹⁶ Ibid

1. Kejelasan pesan kebijakan
 2. Konsistensi kebijakan
 3. Frekuensi pengulangan kebijakan
 4. Penerima pesan
- c. Bentuk kebijakan
1. Partisipasi masyarakat
 2. Tipe kebijakan¹⁷

Berhasilnya pengimplementasian sebuah kebijakan menurut Marilee, dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Isi kebijakan ini terkait sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Kemudian jenis manfaat yang diterima dari kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Serta apakah program yang dijalankan sudah tepat.

Sedangkan variabel lingkungan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi rezim yang sedang berkuasa dan tingkat kepatuhan kelompok sasaran.

¹⁷ Ibid, 163

Pengimplementasian kebijakan ada dua hal yang didapatkan setelah dilakukan evaluasi. Keberhasilan atau pun kegagalan. Arif Rohman menyebutkan ada tiga factor yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan yakni factor rumusan kebijakan, factor personel pelaksana dan faktor sistem organisasi pelaksana.¹⁸

Teori tentang kebijakan ini telah banyak dikemukakan para ahli kebijakan publik. Seperti yang dikemukakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn. Selain itu juga ada teori yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn. Serta teori yang dikemukakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dan teori yang dikemukakan Edward.

1. Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Teori yang dikemukakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn ini menggunakan pendekatan *he top down approach*. Keduanya berpendapat bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka dibutuhkan banyak syarat, di antaranya :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang berarti
- b. Untuk pelaksanaan program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai

¹⁸Ibid, 140

- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan untuk benar-benar ada dan tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
- g. Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.¹⁹

2. Teori Van Meter dan Van Horn

Teori yang digagas Van Meter dan Van Horn ini membahas tentang penyebab sebuah kebijakan yang diimplementasikan ada yang berhasil dan adapula yang gagal.

Penyebab berhasil dan gagalnya kebijakan itu kemudian dijelaskan dalam enam variabel utama dan empat variabel tambahan yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja kebijakan.

¹⁹ H. M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 96-97.

Keenam variabel tersebut meliputi : standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, interorganisasi, dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta karakter pelaksana.²⁰

Van Meter dan Van Horn mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusann-keputusan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Teori Daniel Mazmanian dan Paul A . Sabatier

Teori yang dikemukakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dikenal sebagai *a frame work for implementation analysis* atau kerangka analisis implementasi.

Keduanya berpendapat bahwa peran penting dari kerangka analisis implementasi dari suatu kebijakan, khususnya kebijakan pendidikan adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan formal implementasi tersebut selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

²⁰Ibid, 97

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan
- b. Kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
- c. Pengaruh lingkungan berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.²¹

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.²²

Dari apa yang dijelaskan Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier ini dipahami bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrative yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak terlibat.

4. Teori Edward

²¹ H.M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada : 2015), 98

²²Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Cet. V (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 135

Nama lengkap pencetus teori ini adalah George C. Edward III. Dia menyebutkan ada empat variabel kritis agar implementasi kebijakan pendidikan menjadi efektif, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*) atau sikap (*attitude*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).²³

Masing-masing dari keempat variabel yang dikemukakan Edward dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Komunikasi, yaitu yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan pendidikan dikomunikasikan pada organisasi public, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi .
- b. Sumber daya, yaitu yang berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial.

²³Ibid, 99

- c. Disposisi, yaitu berkenaan dengan kesediaan dari implementor untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa ketersediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Bagaimana dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan konsistensi. Karena disposisi yang dimaksud adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, sehingga apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d. Struktur birokrasi, yaitu berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan pendidikan. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektifitas implementasi kebijakan pendidikan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang menangani bidang pendidikan. Karena struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur

yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedure atau SOP).²⁴

Sebelum melaksanakan sebuah kebijakan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjalankan kebijakan itu.

Dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan sebelum dilakukannya sebuah kebijakan, dapat meminimalisasi dampak kekurangan yang bakal ditimbulkan dari sebuah kebijakan.

Salah satu instrument yang paling sering digunakan untuk menentukan pertimbangan sebelum melakukan kebijakan adalah analisis SWOT.

SWOT merupakan singkatan dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threat*.

Strength berarti kekuatan. *Weakness* berarti kelemahan. *Opportunities* berarti pendukung. Dan *threat* berarti penghambat.

Keempat faktor itu, dibagi menjadi dua kategori. Yakni faktor yang berasal dari dalam atau disebut faktor internal. Dan faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari *Strength* dan *Weakness*.

²⁴Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), 90-92

- a. Strength adalah faktor pendorong dan kekuatan yang berasal dari dalam organisasi. Yang dimaksud dengan kekuatan dalam organisasi ialah seluruh komponen dalam organisasi pelaksana kebijakan baik itu sumber daya maupun kemampuan yang dapat dioptimalkan sehingga memberikan manfaat lebih dan membantu terlaksananya sebuah kebijakan. Contoh konkritnya adalah kepemimpinan yang efektif, keuangan, kualitas SDM, serta berbagai aspek lainnya.
 - b. Weakness adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki namun tidak dimiliki organisasi pelaksana kebijakan. Sehingga tidak adanya itu menjadi sebuah kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga secara sederhana weaknes adalah tidak adanya kepemimpinan yang efektif, tidak adanya anggaran yang cukup, dan SDM yang tidak berkualitas.
2. Faktor eksternal

Faktor eksternal terdiri dari *Opportunity* dan *threat*.

- a. *Opportunity* adalah faktor yang mendukung organisasi. Faktor yang mendukung ini adalah dukungan dari luar organisasi seperti dukungan pemerintah, masyarakat, serta teknologi.
- b. *Threat* adalah faktor penghambat yang dapat mengancam kelancaran pelaksanaan sebuah kebijakan. Misalnya tidak sejalan dengan kebijakan lainnya, hilangnya sumber dana dan masyarakat yang tidak antusias pro aktif dalam sebuah kebijakan.

B. Kajian Teori tentang Pengetahuan Keagamaan

Sebagaimana disebutkan dalam penegasan istilah, yang penulis maksud dengan pemahaman keagamaan adalah pemahaman yang dimiliki peserta didik terkait materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang meliputi akidah, ibadah atau fikih, akhlak, dan keterampilan membaca dan menulis Alquran.

Pendidikan agama Islam diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan bagi bangsa Indonesia dalam era globalisasi ini sangatlah penting karena melalui usaha pendidikan dapat ditentukan keberhasilan dan semua pelaksanaan pembangunan yang dicita-citakan baik berupa pembangunan fisik, maupun mental spiritual.

Pendidikan juga merupakan syarat mutlak untuk menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional itu dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potenssi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berkahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁵

²⁵Undang-undang Sisdiknas, 2003, Jakarta : Sinar Grafika, 7

Upaya ini dilakukan secara selaras dengan program-program seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pembaharuan-pembaharuan kurikulum yang terus direvisi menjadi semakin sempurna.

Pendidikan di dalam Islam memiliki posisi yang strategis. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas, akan lahir dan tercipta individu yang beradab dan berakhlak untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan bermoral.

Pendidikan islam bagi umat manusia merupakan ssstem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang keislaman.

Pendidikan Islam diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia dalam hal keagamaan. Peningkatan kualitas pendidikan agama harus dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidikan, di samping melakukan pembaharuan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyediaan media yang memadai.

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam secara bahasa adalah *tarbiyah, ta'lim, ta'rih* dan *tahzib*.

- a. Tarbiyah berasal dari kata *rabba, yarubbu, rabhan* yang berarti mengasuh, memimpin, mengasah (anak).²⁶ Penjelasan atas kata Tarbiyah ini dapat dipahami memiliki makna memperbaiki, menguasai urusan, memelihara dan merawat, memperindah, memberi makna, mengasuh, memiliki, mengatur dan menjaga kelestarian maupun

²⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyah, 2007), 136

eksistensinya. Dengan demikian kata tarbiyah ini berarti usaha memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengatur kehidupan peserta didik agar dapat survive lebih baik dalam kehidupannya.²⁷ Dengan demikian, pada kata tarbiyah mencakup tujuan pendidikan.

- b. Ta'lim, Mahmud Yunus dengan singkat mengartikan ta'lim sebagai hal yang berkaitan dengan mengajar dan melatih. Sementara itu, Muhammad Rasyid Ridha mengartikan ta'lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Sedangkan Quraisy Shihab menjelaskan kata yuallimu sebagaimana terdapat dalam surah Al Jumua' ayat 2, dengan arti mengajar yang intinya tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika serta fisika.²⁸
- c. Ta'dib berasal dari kata addaba, yuaddibu, ta'diban yang berarti pendidikan. Kata ta'dib berasal dari kata adab yang berarti beradab, bersopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral dan etika.²⁹

²⁷ Abdul Majid dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), 11

²⁸ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : kencana Prenada Media, 2012) , 11

²⁹ Mahmud Yunus, 278

Kata ta'dib dalam arti pendidikan, sebagaimana disinggung di atas, ialah kata yang dipilih oleh Naquid Al Attas. Dalam hubungan ini, ia mengartikan ta'dib sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan. Melalui kata ta'dib ini, Al Attas ingin menjadikan pendidikan sebagai sarana transformasi nilai-nilai akhlak mulia yang bersumber dalam ajaran agama yang bersumber pada diri manusia, sehingga menjadi dasar bagi terjadinya proses islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini menurutnya perlu dilakukan dalam rangka membentung pengaruh materialism, sekularisme, dan dikotomisme ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh barat.

- d. Tahzib, secara harfiah berarti pendidikan akhlak atau menyucikan diri dari perbuatan akhlak yang buruk, dan berarti pula yang beradab sopan.³⁰ Dari pengertian tersebut, tampak bahwa secara keseluruhan kata tahzib terkait dengan perbaikan mental spiritual, moral dan akhlak, yaitu memperbaiki mental seseorang yang tidak sejalan dengan ajaran atau norma . Memperbaiki akhlak dan budi pekertinya agar menjadi berakhlak mulia.

³⁰ Mahmud Yunus, 480

Berbagai kegiatan termasuk termasuk bidang kegiatan pendidikan.

Itulah sebabnya kata tahzib juga berarti pendidikan.

H. M Arifin memandang bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan hamba Allah atau dalam perspektif pendidikan disebut sebagai anak didik dengan berpedoman pada ajaran Islam. Abdul Munir Mul Khan mengartikan pendidikan Islam sebagai suatu kegiatan insaniah memberi atau menciptakan peluang untuk teraktualkannya akal potensial menjadi akal actual, atau diperolehnya pengetahuan yang baru. Sedangkan M Kanal Hasa sebagaimana dikutip Taufiq Abdullah dan Sharon Shiddique mendefinisikan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses yang komprehensif dari perkembangan kepribadian manusia secara keseluruhna yang meliputi intelektual, spiritual, emosi dan fisik.³¹

Sementara menurut Zakiah Daradjat dalam buku berjudul Ilmu Pendidikan Islam dikatakan :

- a. Pendidikan agama Islam ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya pandangan hidup (way of life).

³¹ Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), 93

- b. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam
- c. Pendidikan agama Islam berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai pandangan hidupnya. Demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.³²

Menurut Muhaimin yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau lembaga untuk membantu seorang atau sekelompok siswa dalam menanamkan ajaran dan menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam menurutnya juga diartikan sebagai fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang berdampak pada tertanamnya ajaran dan tumbuh kembangnya nilai-nilai Islam pada salah satu atau beberapa pihak dan pendidikan Islam juga diartikannya sebagai keseluruhan lembaga pendidikan yang mendasari segenap program dan kegiatan pendidikannya atau pandangan serta nilai-nilai Islam.³³

³² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 86

³³ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), 103

C. Kajian Teori tentang Program *Palu Kana Mapande*

Palu Kana Mapande merupakan program Pemerintah Kota Palu yang operasionalnya dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Palu. Dalam penerapannya di satuan pendidikan, program *Palu Kana Mapande* ini, dibagi menjadi dua. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) biasa disebut dengan istilah Tambahan Jam Pelajaran Agama (TJPA) sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) disebut dengan Bina Bakat dan Prestasi.

Penelitian yang dilakukan penulis ini fokus pada penerapan program *Palu Kana Mapande* pada jenjang sekolah dasar yakni Tambahan Jam Pelajaran Agama (TJPA).

1. Program *Palu Kana Mapande*

Program *Palu Kana Mapande* ini dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2016-2021.

Palu Kana Mapande berasal dari tiga suku kata bahasa lokal yakni Kaili. Palu merupakan tempat atau daerah yang menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Palu atau Kota Palu membentang sejauh 395,06 kilo meter persegi. Palu terletak di sebuah lembah pada ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut.

Secara geografis, di sebelah utara, Palu berbatasan dengan Kabupaten Donggala. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sigi Biromaru,

Kabupaten Sigi. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.³⁴

Kata kedua dalam *Palu Kana Mapande* adalah *Kana*. *Kana* merupakan kata yang diambil dari bahasa Kaili yang berarti benar atau betul. Kata *Kana* juga bisa diartikan sebagai harus atau wajib. Seperti dalam kalimat bahasa lokal “*Kana patora ia* yang berarti kamu harus mengingatnya. Kata *Kana* juga berarti tetap seperti pada kalimat *kana nasaro natetora* : walaupun dirimu jauh di negeri orang, tetap selalu ingat.³⁵

Dalam kamus bahasa Kaili Ledo Indonesia-Inggris disebutkan bahwa - *kana* berarti harus, betul, atau benar.³⁶

Sedangkan *mapande* berasal dari kata dasar *pande-Napande* yang berarti pintar, pandai, cakap, terampil.³⁷ Ejaan *mapande* adalah kata dasar *pande* yang ditambahkan imbuhan *me* pada bahasa Kaili. Dari *pande* menjadi *mapande* mengandung arti menjadi pintar. Sehingga *pande* berarti pintar sedangkan *mapande* berarti menjadi pintar.

Berdasarkan pengertian itu, penulis menyimpulkan bahwa program *Palu Kana Mapande* merupakan program Pemerintah Kota Palu dalam bidang pendidikan

³⁴Haliadi Sadi, Syakir Mahid, dan Ismail Syawal. Sejarah DPRD Kota Palu dan Gagasan Anggota Terpilih untuk pembangunan Kota Palu periode 2014-2019. Jogjakarta : Ombak. 2015. 2

³⁵ Kamuskaili.blogspot.co.id/2014/04/k.html?, diakses 25 Februari 2022

³⁶ Tim Penyusun Bahasa Kaili, Kamus Kaili Ledo Indonesia-Inggris, (Palu: Sehati Prima Sejahtera, 2003), 17

³⁷Ibid 153

yang mengandung arti Kota Palu harus benar dan betul-betul menjadi pintar, cakap, terampil dan pandai.

Palu Kana Mapande sebagai program mendukung arah kebijakan, strategi, sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam penerapannya, program *Palu Kana Mapande* dalam dokumen RPJMD dijelaskan dalam empat bentuk kegiatan yakni

1. Beasiswa bagi siswa kurang mampu
2. Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya
3. Baca dan tulis Alquran
4. Membentuk sanggar seni di tingkat sekolah menengah pertama

Penelitian ini akan memfokuskan program *Palu Kana Mapande* pada jenis kegiatan ketiga yakni baca dan tulis Alquran. Hal ini juga sejalan dengan semangat hadis Rasulullah s.a.w yang memotivasi umatnya untuk terus belajar membaca Alquran.

كِتَابٍ مِنْ حَرْفًا قَرَأَ مَنْ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَسْعُودِ ابْنِ وَعَنْ
 ”حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ وَلَا مِ حَرْفٌ أَلِفٌ وَلَكِنْ حَرْفٌ الْمِ أَقُولُ لَا ، أُمَّثَلِهَا بِعَشْرٍ وَالْحَسَنَةُ حَسَنَةٌ فَلَهُ اللَّهُ

Artinya : Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif laam miim itu satu huruf, tetapi aliif itu satu huruf, laam itu satu huruf, dan miim itu satu huruf.” (HR. Tirmidzi, no. 2910. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih). [HR. Tirmidzi, no. 2910.

Yang paling mendasari semangat belajar membaca Alquran juga dapat dilihat dari firman pertama yang diturunkan Allah pada surah Al Alaq ayat 1-5. Di dalam ayat tersebut secara jelas diperintahkan untuk membaca.

٥ يَعْزَمُ لَمْ مَا الْإِنْسَانَ عَلَّمَ ٤ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِي ٣ الْأَكْرَمُ وَرَبُّكَ إِفْرَأُ ٢ عَلَوِّ مِنْ الْإِنْسَانَ خَلَقَ ١ خَلَقَ الَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ إِفْرَأُ

Artinya : “1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, 4) Yang mengajar (manusia) dengan pena. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Kegiatan baca dan tulis Alquran dalam program *Palu Kana Mapande* penerapannya dilakukan di luar jam sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) di mana sasaran dari program ini adalah terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya pada lembaga masyarakat dengan indikator kinerja yaitu persentase sekolah yang menerapkan pendidikan agama di luar jam sekolah bagi kelas 5 sekolah dasar.

Secara hukum, program *Palu Kana Mapande* telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu 2016-2021.

Perda ini sejalan dengan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah itu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan daerah diperlukan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kota Palu dalam kurun waktu 5 tahun. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021.

2. Kurikulum Baca Tulis Alquran dalam Program *Palu Kana Mapande*

Program *Palu Kana Mapande* pada pembelajaran agama Islam diarahkan pada pembinaan dan penguatan kemampuan baca tulis Alquran, bimbingan pengamalan ibadah dan pembinaan akhlak mulia yang dikhususkan peserta didik kelas V tingkat sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu.

Tujuan utama program ini adalah membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan membaca dan menulis Alquran serta menjadikannya bacaan utama, menghayati, dan mengamalkan serta menjadikannya pedoman dalam kehidupan individu, sosial dan masyarakatnya secara beradab di atas landasan iman dan takwa kepada Allah SWT.

Capaian kelulusan dan kompetensi pembelajaran baca tulis Alquran dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Kompetensi inti

Kompetensi inti pada program baca tulis Alquran ini meliputi

1. Dimensi sikap dengan kualifikasi memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, di lingkungan rumah, sekolah, dan sosial berbasis nilai-nilai Alquran.
2. Dimensi pengetahuan dengan kualifikasi memiliki kemampuan membaca, menulis, dan pemahaman secara factual dan kenseptual berdasarkan rasa ingin tahu dan kecintaannya terhadap Alquran, tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan nilai-nilai keadaban, kemanusiaan dan lingkungan.
3. Dimensi keterampilan dengan kualifikasi memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif serta kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan nilai-nilai Alquran.

b. Kompetensi Dasar

Sesudah mengikuti BTQ dalam Program *Palu Kana Mapande* diharapkan peserta didik dapat menguasai materi pokok dan materi penunjang dengan uraian sebagai berikut :

1. Mengenal dan memahami huruf hijaiyyah dan kalimat serta potongan-potongan ayat Alquran melalui panduan atau buku paket
2. Mengucapkan huruf hijaiyyah dan membaca ayat-ayat Alquran secara fasih dan tartil sesuai makhraj dan sifatnya

3. Menghafal surah-surah pendek dalam Alquran sesuai dengan target yang telah ditentukan
4. Menghafalkan doa harian dan doa sesudah salat
5. Menghafal bacaan-bacaan salat dan mampu mempraktikkan tata cara pelaksanaannya dengan baik dan benar
6. Mampu membiasakan sikap dan adab yang baik dalam kehidupan sehari-hari
7. Memiliki keterampilan menulis huruf dan kalimat arab, serta ayat-ayat dan hadits dengan baik dan benar.³⁸

c. Kerangka Isi Materi Pembelajaran BTQ

Program pembelajaran baca tulis Alquran terbagi pada empat pelajaran yaitu :

1. Mengenal huruf hijaiyyah
 - a. Huruf hijaiyyah urutan baghdadiyah
 - b. Huruf hijaiyyah urutan rubaiyyat
 - c. Menghafal huruf hijaiyyah cara rubaiyyat
 - d. Huruf hijaiyyah rubaiyyat dalam berbagai posisi
 - e. Latihan
 - f. Penguatan adab dan doa harian
 - g. Kitabah atau menulis dan kisah-kisah teladan

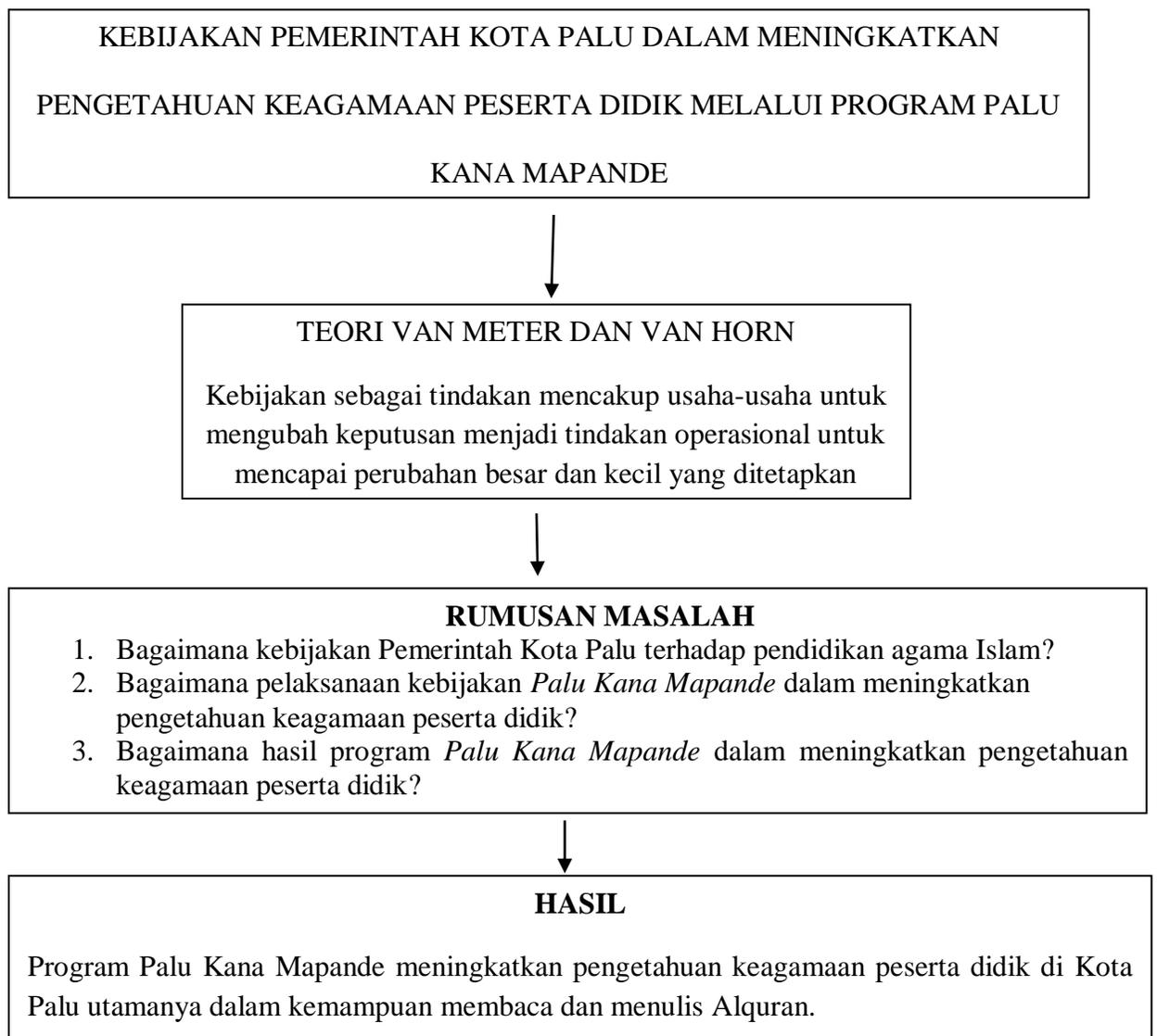
2. Membaca Kata
 - a. Membaca kata bertanda vokal a-i-u
 - b. Membaca kata bertanda vokal an-in-un
 - c. Membaca huruf mati dan bunyi diftong
 - d. Menggandakan bunyi huruf
 - e. Latihan
 - f. Penguatan adab dan doa harian
 - g. Kitabah atau menulis dan kisah-kisah teladan
3. Membaca Kalimat
 - a. Membaca panjang doa vokal
 - b. Membaca kalimat-kalimat Alquran
 - c. Menghilangkan bacaan huruf-huruf tertentu
 - d. Melebur bunyi bacaan
 - e. Latihan
 - f. Penguatan adab dan doa harian
 - g. Kitabah atau menulis dan kisah-kisah teladan
4. Mengenal huruf hijaiyyah
 - a. Membaca huruf terpisah di awal-awal surah
 - b. Menghentikan bacaan Alquran
 - c. Berhenti sejenak (saktah)
 - d. Tanda-tanda bacaan dalam Alquran
 - e. Latihan

- f. Penguatan adab dan doa harian
- g. Kitabah atau menulis dan kisah-kisah teladan.³⁹

D. Kerangka Teori

Untuk memudahkan memahami teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Berikut ini bagan kerangka teorinya.



³⁹ Ibid, V

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode ilmiah yang sering digunakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan sejumlah perilaku lainnya, termasuk ilmu pendidikan.¹

Penelitian kualitatif menitikberatkan pada kehadiran penulis untuk melihat langsung kejadian secara empiris lokasi penelitian. Terlebih lagi, penelitian yang dilakukan ini bersifat sosial dinamis yang mengharuskan adanya pengamatan langsung di lapangan.

Penelitian kualitatif bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam. Jenis penelitian ini, menggunakan desain deskriptif yang memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara gamblang dan dengan segala kejadian yang menyertainya.

Dalam penelitian seperti ini, peneliti berusaha memberikan gambaran yang jelas dan sistematis berkaitan dengan sasaran penelitian.

.Penulis akan mengeksplorasi, menggambarkan dan menjelaskan suatu kejadian berdasarkan fakta empiris yang terlihat di lapangan berdasarkan data yang akurat.

¹ Amirul Hadi dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung. CV Pustaka Setia. 2005, 14

Dalam penelitian jenis ini juga, penulis tidak diperkenankan menggunakan hipotesa sebagai petunjuk dalam penelitian. Seluruh data penelitian berdasarkan data yang akurat disertai dengan fakta yang terlihat di lapangan. Sehingga kehadiran penulis dalam penelitian kualitatif, niscaya adanya.

Penelitian dengan jenis deskriptif dijelaskan Best merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.²

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan desain deskriptif sehingga penulis akan memberikan gambaran tentang Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Peserta Didik dalam program *Palu Kana Mapande* berdasarkan pengamatan langsung selama penulis melakukan penelitian.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam proposal Tesis ini adalah desain penelitian studi kasus. Desain penelitian studi kasus merupakan salah satu di antara jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan desain studi kasus merupakan penelitian yang melibatkan subjek penelitian dari kelompok masyarakat tertentu. Desain penelitian studi kasus juga digunakan untuk meneliti suatu fenomena atau objek penelitian yang kompleks.

² Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan. : Kompetensi dan Prakteknya*, (Yogyakarta : Sinar Grafika Offset, cet. Kelima belas). 2016. 14

Susilo Rahardjo dan Gudnanto menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Selain mempelajari karakter individu, juga membantu menentukan solusi atas permasalahan yang dihadapi individu tersebut.³

Harapannya adalah ketika masalah yang dihadapi bisa terselesaikan. Maka individu tadi akan memiliki karakter dan cara berpikir yang lebih baik. Dari penjelasan Susilo Rahardjo dan Gudnanto dapat dipahami bahwa desain penelitian studi kasus ini untuk memahami suatu fenomena secara mendalam. Cara yang digunakan untuk memahami fenomena itu dengan berada di lokasi dan bertemu dengan individu yang mengalami fenomena itu.

Bimo Walgito yang menerangkan bahwa metode studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Bimo juga menambahkan bahwa untuk melaksanakan penelitian studi kasus diperlukan informasi sebanyak mungkin dan integrasi data. Integrasi data ini bisa diperoleh dari metode penelitian lain untuk bisa memberikan informasi yang lebih detail dan mendalam.⁴

³ <https://www.duniadosen.com/penelitian-studi-kasus/> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 10.00 Wita

⁴Ibid

Penjelasan dari Bimo Walgito ini memberikan pemahaman bahwa desain studi kasus akan menghasilkan sangat banyak informasi bagi penulis yang melakukan penelitian. Penulis akan terdorong untuk aktif mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang akan diintegrasikan sehingga terkumpul informasi yang detil dan mendalam.

Desain penelitian Studi Kasus berbeda dengan desain penelitian kuantitatif, tetapi kurang lebih sama dengan desain penelitian kualitatif pada umumnya. Tidak ada pola baku tentang format desain penelitian Studi Kasus, sebab; (1) instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, sehingga masing-masing orang bisa memiliki model desain sendiri sesuai selernya, (2) proses penelitian Studi Kasus berlangsung secara siklus, sebagaimana penelitian-penelitian kualitatif pada umumnya, dan (3) metode penelitian Studi Kasus berangkat dari kasus atau fenomena tertentu yang dianggap akan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berkaitan dengan tipologi penelitian Studi Khusus, Yin mengajukan lima komponen penting untuk penyusunan desain penelitian Studi Kasus, yaitu: (1) pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) proposisi penelitian (jika diperlukan), Proposisi ini diperlukan untuk memberi isyarat kepada peneliti mengenai sesuatu yang harus diteliti dalam lingkup studinya; (3) unit analisis penelitian, (4) logika yang mengaitkan data dengan proposisi, dan (5) kriteria untuk menginterpretasi temuan.

Komponen 1-3 membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan komponen 4-5 membantu peneliti dalam langkah-langkah analisis data.⁵

Pertanyaan yang tepat untuk penelitian Studi Kasus, yakni “bagaimana” dan “mengapa”, selain “apa”. Semua pertanyaan tersebut mengarah kepada kasus yang hendak diangkat.

Misalnya, tentang pengambilan keputusan oleh seorang pimpinan perusahaan, tentang program kerja, implementasi atau pelaksanaan program, dan perubahan organisasi.

Komponen kedua ialah proposisi penelitian. Proposisi terkait dengan kecakapan peneliti menganalisis data. Sebagaimana diketahui tata urutan proses penelitian Studi Kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya ialah perolehan data, data diolah untuk menjadi fakta/realita/ untuk selanjutnya menjadi konsep/ konsep menjadi proposisi, dan proposisi menjadi teori. Komponen ketiga ialah unit analisis.

Komponen ketiga ini merupakan persoalan fundamental dalam menentukan apa “kasus” yang diteliti. Di metode penelitian kuantitatif, unit analisis disebut sebagai “objek” penelitian. Umpama peneliti akan meneliti seseorang yang memiliki perilaku menyimpang dari orang-orang pada umumnya dalam interaksi sosial. Unit

⁵ Mudjia Rahardjo, *Desain Penelitian Kasus*. Makalah yang disampaikan pada kegiatan di UIN Maulana Malik Ibrahim

analisisnya adalah individu, sehingga segala informasi tentang individu tersebut wajib dikumpulkan selengkap mungkin.⁶

Komponen keempat dan kelima biasanya kurang memperoleh perhatian peneliti Studi Kasus. Komponen ini menyajikan tahap analisis data, dan desain penelitian harus menjadi dasar analisis.

Desain penelitian yang tepat akan memudahkan peneliti bisa sampai tujuan penelitian dengan tepat pula. Terkait dengan komponen kelima, yakni kriteria untuk menginterpretasi temuan penelitian hingga kini tidak ada pola yang baku. Tetapi Campbell, sebagaimana dikutip Yin, menyarankan dengan cara mengkontraskan dan membandingkan pola-pola yang berbeda yang telah ditemukan. Dengan mengkontraskan dan membandingkan, akan ditemukan temuan konseptual sebagai tujuan akhir penelitian.⁷

B. Lokasi Penelitian

Dalam mendukung penelitian ini agar penulis mendapatkan gambaran yang nyata tentang objek penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian di beberapa tempat di Kota Palu. Pertama ialah Kantor Wali Kota Palu, khususnya bagian Hukum untuk menanyakan dasar hukum kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan peserta didik. Kemudian, di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Palu. Kehadiran penulis di kantor

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Dikbud Kota Palu sangat diperlukan sebab organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang menerapkan kebijakan pemerintah Kota Palu dalam peningkatan pemahaman atau di bidang pendidikan ialah Dikbud Kota Palu.

Selain itu, penulis juga akan ke beberapa sekolah. Sedikitnya 4 sekolah dasar yang melaksanakan program *Palu Kana Mapande* untuk melihat sejauhmana efektifitas program itu berjalan di sekolah.

C. Kehadiran Penulis

Dalam melaksanakan penelitian, penulis memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan hasil penelitian berdasarkan data yang valid dan akurat serta pengamatan langsung dari penulis.

Penulis bertanggung jawab mengumpulkan data di lokasi penelitian sehingga penulis tahu betul bahwa data dan hasil pengamatan yang dilakukan merupakan hasil yang valid dan sesuai dengan fakta lapangan.

Sebagaimana telah diketahui, dalam penelitian kualitatif ini, pendekatan yang digunakan ialah pengamatan langsung dari penulis. Sehingga kehadiran penulis di lokasi penelitian menjadi suatu hal yang wajib dan tidak dapat diwakili oleh siapapun.

Kehadiran penulis sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan memberikan hasil penelitian yang akurat berdasarkan pengalaman yang dilakukan.

Dalam kehadirannya, penulis berperan mengamati proses dari kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Palu yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan keagamaan peserta didik.

Manusia merupakan alat (instrumen terpenting) dalam mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan yang ada di lapangan.⁸

Pendapat serupa juga dikemukakan Arifin. Dia menjelaskan bahwa kehadiran penulis di lokasi penelitian sebagai instrumen utama adalah sebuah keharusan. Menurutnya, kehadiran penulis menentukan kevalidan data-data yang dikumpulkan. Dengan hadirnya penulis di lokasi, maka data yang dikumpulkan itu memiliki kualitas yang tinggi dan lengkap atau biasa juga disebut dengan istilah “*complete cooperation*”.⁹

Sugiono juga menjelaskan bahwa dalam penelitian seperti ini, kehadiran di lokasi penelitian merupakan instrumen kunci.¹⁰ Dengan penjelasan seperti itu, maka hadirnya penulis di lokasi yang menjadi objek penelitian tidak bisa dibantah dan suatu hal yang harus dilakukan untuk mendukung kevalidan data yang dikumpulkan berdasarkan pengamatan langsung.

Penulis memiliki ciri-ciri umum sebagai instrument yaitu: *responsive* terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan,

⁸ Margono. *Penelitian Pendidikan*. (Cet II Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 36

⁹ *Ibid*, 75

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 21 (Bandung: Alfabeta, 2015), 21.

menyesuaikan diri terhadap segala keadaan dan situasi pengumpulan data, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan sehingga dalam mengumpulkan metode peneliti dapat menggunakan beberapa metode, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan.¹¹

Dengan begitu, penulis sebagai salah satu sumber data, juga mengumpulkan sekaligus mengolah data serta melaporkan data tersebut secara ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada publik.

D. Data dan Sumber Data

Lofland menjelaskan sebagaimana dikutip Lexy J Moleong, bahwa sumber data utama dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sehingga sumber data dalam penelitian ialah kata-kata dan tindakan, sumber tertulis atau dokumen, foto serta data statistik.¹²

Suharsimi Arikunto menjelaskan yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.¹³

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer. Dan kedua ialah data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung sumber data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut dengan

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, 169

¹²*Ibid*, 157

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 107.

istilah informan. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan.¹⁴

Husein Umar menjelaskan data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁵

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, data primet merupakan data dari pengamatan langsung, dokumen atau pun foto yang diperoleh secara langsung selama berada di lokasi penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah penjelasan Walikota Palu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Palu, Kepala Sekolah, Guru Agama Islam di sekolah, dan para siswa, serta pengamatan yang penulis lakukan secara langsung di sekolah-sekolah.

Berikutnya adalah data sekunder. Data sekunder data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Data sekunder juga bisa diartikan sebagai data penunjang untuk melengkapi keperluan hasil penelitian yang sedang dilakukan.

Menurut Iskandar data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengambilan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelmbagaan,

¹⁴ Winarto Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. (Bandung : Torsito, 1978), 155

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 42.

referansi-referensi, literatur laporan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁶

Dari penjelasan itu, bisa dipahami bahwa data sekunder adalah data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan atau print out rancangan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berbagai macam teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi yang dimaksud yaitu, sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁷

Dalam penelitian, observasi dipahami sebagai teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.¹⁸

¹⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*(Jakarta: Ikapi, 2013), 257

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 107.

¹⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 100.

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa, observasi memiliki kedudukan penting dalam penelitian kualitatif khususnya bagi penulis. Karena hasil observasi merupakan tambahan data yang sangat berharga untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

Informasi tersebut berguna bagi peneliti sebagai informasi pembanding dari hasil wawancara, sehingga memiliki fungsi saling menguatkan antara informasi observasi dan informasi wawancara.

Posisi peneliti dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non partisipan, artinya posisi peneliti adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

Adapun teknik observasi yang dilakukan penulis sebagai berikut: pertama, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan kedua, peneliti mencatat objek pengamatan yang sedang terjadi di lokasi penelitian.

Dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat atau valid dan memadai penulis akan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis mengenai kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan pemahaman keagamaan peserta didik. Sehingga penelitian akan dilakukan di wilayah Kota Palu, baik itu di kantor pemerintahan hingga ke sekolah-sekolah pelaksa program *Palu Kana Mapande*.

2. Teknik Wawancara

Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) dalam hal ini penulis kepada informan. Jawaban-jawaban atau informasi dicatat atau direkam dengan memakai alat perekam.

Menurut Lexy J. Moleong wawancara yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data.¹⁹ Sedangkan menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka dan mendengarkan keterangan-keterangan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Palu, Kepala Bidang Pembinaan SD, para Kepala Sekolah, para guru Agama Islam dan para siswa di beberapa sekolah pelaksana program *Palu Kana Mapande*.

Penulis memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara bertahap. Burhan Bungin memberikan definisi dari teknik wawancara ini yakni wawancara terarah yang dilakukan secara bebas dan mendalam (in-depth), tetapi kebebasan ini tetap

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 165.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 194

tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.²¹

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa teknik wawancara bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara bertatap muka dengan yang diwawancarai dan menanyakan informasi yang diperlukan secara bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan.

Dengan demikian, penulis dapat kembali melakukan wawancara dengan informan, apabila data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan teknik yang sama. Karakter utama teknik wawancara ini adalah pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan.²²

Dengan begitu dipahami bahwa penulis terlibat langsung di lapangan dan bertemu dengan narasumber dan tidak terlibat langsung dengan kehidupan.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.

²¹ Burhan Bungin, *Peneiltan Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Edisi. I. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 110

²² *Ibid*

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²³

Hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Data-data dokumentasi tersebut dapat berupa arsip-arsip yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang sejarah dan memperjelas perkembangan program *Palu Kana Mapande* yang menjadi kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Data, yaitu menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, menjelaskan bahwa:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. 21; Bandung: Alfabeta, 2015), 240

dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif langsung.²⁴

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data yang dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apayang sedang terjadi dan apayang harus dilakukan.²⁵

Penyajian data yakni untuk menghindari kesalahan terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan penelitian, model-model data yang disajikan dalam bentuk penjelasan atau penilaian kata-kata sehingga data dipahami dengan benar dan jelas.

3. Verifikasi Data

Data yang telah direduksi dan disajikan akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan awal yang bersifat sementara. Jika pada pengumpulan data tahap berikutnya tetap didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka

²⁴ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi Rohili dengan judul *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Metode-metode Baru*, (Cet. I; Jakarta: UI Pres,2005), 15-16.

²⁵ *Ibid*, 16

kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yang menemukan makna data yang telah disajikan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data atau validitas data tidak diuji dengan menggunakan metode statistik, melainkan dengan analisis kritis kualitatif. Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dengan beberapa metode triangulasi, antara lain:

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan yaitu: (1) membandingkan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian, beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama;
3. Triangulasi penyidik, ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamat lain untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data, memanfaatkan pengamat lainnya, membantu mengurangi kelencengan dalam pengumpulan data.
4. Triangulasi dengan teori, hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (rival explanation). Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka

penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing. Hal itu dapat dilakukan secara induktif atau secara logika.²⁶

Di samping penulis gunakan berbagai kriteria dan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data di atas, juga penulis melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian.

Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan untuk mempertahankan agar penulis tetap tegar mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Kota Palu

Kota Palu punya sejarah yang panjang. Awalnya, kota Palu merupakan sebuah kerajaan yang terdiri dari empat kampung. Keempat kampung yang merupakan bagian dari kerajaan itu adalah Besusu, Tanggabanggo yang kini wilayah itu menjadi Kelurahan Kamonji. Panggovia yang kini menjadi Kelurahan Lere, dan Boyantongo yang kini menjadi Kelurahan Baru.

Keempat wilayah inilah yang menjadi asal muasal Kota Palu yang kita kenal sekarang ini. Keempat wilayah itu, membentuk dewan adat yang disebut dengan Patanggota.

Patanggota memiliki beberapa tugas. Di antara tugas dewan adat patanggota ini ialah bertugas untuk memilih raja dan pembantu raja yang berkaitan erat dengan kegiatan kerajaan.

Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini semakin berkembang dan dikenal. Tidak hanya itu, kerajaan dari empat wilayah, Besusu, Tanggabanggo, Panggovia, dan Boyantongo ini semakin dikenal khalayak dan memiliki peran dan pengaruh. Hal ini juga yang membuat Belanda melakukan pendekatan dengan kerajaan Palu.

Dalam pendekatan itu, Belanda berkunjung ke Palu pertama kali pada masa kepemimpinan Raja Maili atau Mangge Risa. Pendekatan itu dilakukan Belanda agar mendapatkan perlindungan dari Manado pada tahun 1868.¹

Pendekatan yang dilakukan Belanda ke kerajaan Palu ini membuat Belanda semakin berani dan puncaknya pada 1888, pasukan belanda tiba di Palu dengan dipimpin Gubernur Belanda untuk Sulawesi.

Kedatangannya bersamaan dengan bala tentara dan kapal yang tiba bersamaa. Kedatangan itu juga sekaligus melakukan penyerangan ke salah satu wilayah kerajaan Palu, Kayumalue. Serangan ini juga berakibat terbunuhnya Raja Maili.

Kepemimpinan kerajaan Palu digantikan Raja Jodjokodi. Di bawah kepemimpinannya, Raja Jodjokodi melakukan perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda pada 1 Mei 1888.

Perlu juga diketahui, Kota Palu berasal dari kata Topalu'e yang berarti tanah yang terangkat. Hal itu lantaran, asal usul Kota Palu disebut sebagai daerah lautan yang kemudiann terangkat menjadi daratan. Terangkatnya tanah wilayah Palu terjadi karena gempa dan pergeseran lempeng Palu-Koro sehingga yang sebelumnya lautan tersebut terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi Kota Palu.²

Dalam literature lain, asal usul Kota Palu disebut berasal dari bahasa lokal : Volo. Volo artinya bambu yang tumbuh dari daerah Tawaeli sampai daerah Sigi. Bambu pun menjadi begitu familiar dengan masyarakat lokal Kota Palu. Penggunaan

¹ Palu, Indonesia Travel Weather Averages. Weatherbase. Diakses pada 10 Januari 2023.

² https://id.wikipedia.org/wiki/kota_palu. diakses pada 10 Januari 2023

bambu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Palu sering digunakan. Bambu digunakan mulai dari bahan makanan (rebung), bahan bangunan untuk menjadi dinding, tikar dan lain-lain, perlengkapan sehari-hari, permainan, serta alat music (Lalove).³

Kota Palu ditunjuk menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Palu. Pada masa penjajahan Belanda, Kerajaan Palu bagian dari wilayah kekuasaan (Onder afdeling Palu) yang terdiri dari tiga wilayah yaitu Landschap Palu yang mencakup distrik Palu Timur, Palu Tengah, dan Palu Barat.

Landschap Kulawi, dan landschap Sigi Dolo. Pada tahun 1942, terjadi pengambilalihan kekuasaan dari pemerintahan Belanda kepada pihak Jepang. Pada masa perang dunia II, Kota Donggala yang kala itu merupakan ibukota Afdeling Donggala dihancurkan oleh pasukan sekutu maupun Jepang.

Hal inilah yang mengakibatkan pusat pemerintahan yang sebelumnya berada di Donggala, dipindahkan ke Palu pada tahun 1950. Saat itu, kota Palu memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) setingkat wedana dan menjadi wilayah daerah Sulawesi Tengah yang berpusat di Kabupaten Poso sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 1950. Kota Palu kemudian mulai berkembang

³ <https://noerblog.wordpress.com/2011/09/23/gambaran-umum-kota-palu-sulawesi-tengah>. diakses pada 10 Januari 2023

setelah dibentuknya Residen Koordinator Sulawesi Tengah tahun 1957 yang menempatkan Kota Palu sebagai ibukota Keresidenan.⁴

Terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1964. Status kota Palu ditingkatkan dari ibukota menjadi ibukota provinsi daerah tingkat I Sulawesi Tengah. Pada tahun 1978 Kota Palu ditetapkan sebagai kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1978.

Selanjutnya pada 1994, berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1994, Kota Palu kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya Palu.⁵

B. Kepemimpinan di Kota Palu

Dalam perjalannya, kepemimpinan di Kota Palu, terus mengalami pergantian dari waktu ke waktu. Dinimika itu membuat pertumbuhan di Kota Palu juga semakin baik. Pemimpin tertinggi di Kota Palu sebagai Walikota. Periode perkembangan Kota Palu dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama Kota Administratif pada 1978-1994. Kedua Kotamadya pada tahun 1994-2004. Ketiga Kota, pada periode 2004 hingga sekarang.⁶

Kiesman Abdullah menjadi pemimpin pertama Kota Palu saat berstatus sebagai Kota Administratif pada tahun 1978-1986. Kiesman Abdullah merupakan kelahiran Palu pada 26 Juli 1939.

Pengganti Kiesman Abdullah adalah Syahbuddin Labadjo yang merupakan tokoh pendidikan dan pemimpin di Palu pada 1986-1994. Syahbuddin lahir di

⁴ Wikipedia Kota Palu. Diakses pada 10 Januari 2023

⁵ Palukota.bps.go.id/pertumbuhan-dan-total-penduduk. Diakses 10 Januari 2023

⁶Hadi-Sadi, Syakir Mahid, Ismail Syawal. Sejarah DPRD Kota Palu dan Gagasan Anggota Terpilih untuk Pembangunan Kota Palu periode 2014-2019. Yogyakarta : Ombak. 2015. 14-19

Donggala, 22 September 1940. Syahbuddin kemudian terpilih sebagai Bupati KDH Donggala periode 1994-1999, dan posisinya di Kota Palu digantikan oleh Ruly A Lamadjido.⁷

Kota Administratif Kota Palu kemudian berubah status menjadi Kotamadya pada tahun 1994. Hal itu berlandaskan pada Undang-undang nomor 4 tahun 1994. Selama menjadi Kotamadya, Palu dipimpin tiga sosok Walikota. Yakni Ruly A Lamadjido, yang lahir pada 24 September 1956. Ruly menjabat Walikota sejak 1994-2000. Kemudian digantikan H Baso Lamakarate pada 2000-2005. Baso Lamakarate tidak menyelesaikan masa jabatannya karena April 2004, Baso Lamakarate meninggal dunia dan digantikan Suardin Suebo yang mengisi jabatan sejak 2004 hingga 2005.⁸

Momen istimewa sejarah Kota Palu terjadi pada 1 Agustus 2005. Momen itu adalah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pertama kali dilaksanakan. Ini menjadi pemilihan pertama kepala daerah di kota Palu sejak pertama kali berdiri pada tahun 1984. Kota Palu pada 1 Agustus 2005 ini pertama kali melaksanakan pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota periode 2005-2010.⁹

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu secara langsung tersebut melahirkan pemimpin baru di Kota Palu. Pemilihan pertama kali itu dimenangkan

⁷ Ibid 16

⁸ Ibid 21

⁹ Ibid 24

oleh Rusdy Mastura atau Cudy. Rusdy Mastura terpilih sebagai Walikota Palu bersama dengan Wakil Walikota Palu, Suardin Suebo.

Pasangan ini hanya bisa bertahan hingga 2008, sebab Suardin Suebo mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Donggala. Posisi Wakil Walikota kemudian diisi oleh Mulhanan Tombolotutu. Pemilihan berikutnya, pada 2010 Rusdy Mastura kembali berpasangan dengan Mulhanan Tombolotutu dan keduanya kembali terpilih sebagai Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu periode 2010-2015.¹⁰

Pada tahun 2015, pemilihan Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu kembali digelar. Pada pemilihan ini, ada empat pasang calon yang mengikuti pemilihan. Pasangan pemenang pada pemilihan ini adalah Drs. Hidayat, M.Si berpasangan dengan Sigit Purnomo Said yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015.¹¹ Keduanya menjabat sejak 2016-2021.¹²

Di masa inilah program *Palu Kana Mapande* dilaksanakan sebagai perwujudan visi misi keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Palu.

C. Gambaran Umum Kota Palu

Secara geografis kota Palu merupakan kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kota Palu juga sekaligus ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu yang secara astronomi

¹⁰ [Wikipedia.org/rusdi-mastura](https://id.wikipedia.org/wiki/Rusdy_Mastura). Diakses pada 11 Januari 2023

¹¹ [Wikipedia/hidayat.MSi](https://id.wikipedia.org/wiki/Hidayat_MSi). Diakses pada 11 Januari 2023

¹² [Wikipedia/sigit purnomo said](https://id.wikipedia.org/wiki/Sigit_Purnomo_Said). Diakses pada 11 Januari 2023

terletak pada $0^{\circ}, 36'' - 0^{\circ}, 56''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}, 45'' - 121^{\circ}, 1''$ Bujur Timur, tepat berada di bawah garis khatulistiwa.

Kota Palu merupakan kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk.¹³

Dataran kota Palu dikelilingi oleh pegunungan dan pantai. Peta ketinggian mencatat $376,68 \text{ km}^2$ (95,34 persen). Wilayah Kota Palu berada pada ketinggian 100-500 mdpl dan hanya $18,38 \text{ km}^2$ (46,66 persen) terletak di dataran yang lebih rendah. Kota Palu terletak di bagian utama khatulistiwa, menjadikan Kota Palu sebagai salah satu kota tropis terkering di Indonesia dengan curah hujan kurang dari 1.000 mm per tahun.

Secara administratif, kota Palu merupakan daerah otonom yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dan menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Tengah.

Berikut ini batas wilayah administratif Kota Palu.

- a. Sebelah utara, Kota Palu berbatasan dengan kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala
- b. Sebelah selatan, Kota Palu berbatasan dengan Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- c. Sebelah barat, Kota Palu berbatasan dengan Kecamatan Pinembani, Kecamatan Kinovaro Marawola Kabupaten Sigi dan Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala

¹³ Tim penyusun. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Palu tahun anggaran 2015, 4

- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala.¹⁴

Luas wilayah Kota Palu yakni 395,06 km² yang dibagi dalam 8 kecamatan dan 46 kelurahan. Berikut ini rincian detilnya :

Tabel

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palu

No	Kecamatan (nama)	Kelurahan (jumlah)
1.	Palu Utara	5
2.	Tawaeli	5
3.	Palu Barat	6
4.	Ulujadi	6
5.	Palu Selatan	5
6.	Tatanga	6
7.	Palu Timur	5
8.	Mantikulore	8
Jumlah		46

Data : Bagian umum Sekretariat Daerah Kota Palu

¹⁴ Ibid

Keadaan geologi Kota Palu secara umum sama untuk semua kecamatan yaitu jenis tanah Alluvial yang terletak di lembah Palu. Secara umum formasi geologi tanah di Kota Palu berdasarkan laporan dari SPRS menunjukkan bahwa formasi geologinnya terdiri dari batuan gunung berapi dan batuan terobosan yang tidak membeku (innuous instrusiverocks). Di samping pula batuan-batuan metamorphosis dan sedimen.¹⁵

Keadaan geologi Kota Palu secara umum berupa lembah. Pusat kota terletak di bagian tengah dari lembah tersebut. Lembah ini mengikuti arah jalur pegunungan di kedua sisinya yakni berarah relative utara-selatan.

Secara geologis, orientasi fisiografi ini berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun Kota Palu, di mana sisi kiri dan kanan Kota Palu merupakan jalur patahan utama. Yaitu patahan Palu-Koro serta wilayahnya disusun oleh batuan yang lebih keras disbanding material yang menyusun bagian lembah.¹⁶

Topografi daerah Kota Palu berdasarkan satuan geomorfologi dapat dibagi ke dalam tiga satuan, yaitu :

1. Satuan geomorfologi dataran dengan penampakan morfologi berupa topografi tidak teratur, lemah, merupakan wilayah dengan banjir musiman,

¹⁵ Ibid, 5

¹⁶ Ibid, 6

dasar sungai umumnya meninggi akibat sedimentasi fluvial. Morfologi ini disusun oleh material utama berupa alluvial sungai dan pantai. Wilayah tengah Kota Palu didominasi oleh satuan geomorfologi ini.

2. Satuan geomorfologi denudasi dan perbukitan, dengan penampakan berupa morfologi bergelombang lemah sampai bergelombang kuat. Wilayah kipas alusial (alluvial fan) termasuk dalam satuan morfologi ini. Di wilayah Palu, morfologi ini meluas di wilayah Palu Timur, Palu Utara, membatasi antara wilayah morfologi dataran dengan morfologi pegunungan.
3. Satuan morfologi pegunungan Tebing patahan merupakan wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Penampakan umum berupa tebing-tebing terjal dan pelurusan morfologi akibat proses patahan. Arah pegunungan ini hampir utara-selatan. Baik di timur maupun di barat dan menunjukkan pengaruh struktur/tektonik terhadap bentuk kini morfologi kota berupa lembah. Umumnya wilayah ini bukan merupakan wilayah hunian.¹⁷

D. Pendidikan di Kota Palu

Selain di bidang infrastruktur, pembangunan di Kota Palu juga diarahkan untuk menasar pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan di Kota Palu juga diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dalam arti yang luas. Perhatian itu diwujudkan dengan mendorong penyelenggara pendidikan pada semua jenjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan

¹⁷ Ibid 6-7

kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Iptek, serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal atau memiliki budi pekerti yang luhur.

Pendidikan di Kota Palu menjadi salah satu aspek yang sangat penting pelaksanaannya. Beragam upaya dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan ini juga menjadi investasi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu dari misi RPJMD kota Palu yaitu misi kedua adalah mewujudkan sumber daya manusia kota Palu yang berdaya saing. Dan dalam rangka mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Dengan demikian, pemerataan kesempatan pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaannya sarana dan prasarana pendidikan seperti tersediannya gedung sekolah, perpustakaan dan buku-buku penunjang pelajaran serta tenaga pendidik (guru).

E. Kebijakan *Palu Kana Mapande* (periode 2017-2021)

Kebijakan ini merupakan kebijakan Pemerintah Kota Palu di bawah kepemimpinan Walikota Palu Drs. Hidayat, M.Si dan Wakil Walikota Sigit Purnomo Said pada periode 2017 hingga 2021.

Pemerintah menyadari perlunya memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan di Kota Palu. Perhatian itu dilaksanakan dalam program *Palu Kana Mapande*. Dalam penerapannya ini, program ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa sebagai tanggung jawab pemerintah mewujudkan pendidikan yang berakhlak, berbudaya dan berkarakter.

Hidayat, di dalam pengantar buku pegangan peserta didik untuk program *Palu Kana Mapande* menjelaskan harapannya jika program *Palu Kana Mapande* ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Palu terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Palu.¹⁸ Secara filosofis, Hidayat juga menjelaskan alasannya membuat kebijakan *Palu Kana Mapande*. Program ini dijelaskan Hidayat mengadopsi apa yang pernah dilakukan ulama kenamaan Habib Idrus bin Salim Aljufri atau Gutu Tua.¹⁹

Hidayat juga mempertegas jika tujuan adanya program *Palu Kana Mapande* adalah untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik di Kota Palu. Menurutnya, terjadi pergeseran pendidikan yang kian lama, semakin meninggalkan agama. Olehnya Hidayat beranggapan, perlu ada intervensi yang dilakukan untuk kembali memberi perhatian lebih terhadap pendidikan agama. Hal ini juga diperkuat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) periode itu, Ansyar Sutiadi, S.Sos., M.Si.

¹⁸ Kata pengantar Walikota Palu, Hidayat dalam buku pegangan peserta didik.

¹⁹ <https://sultengraya.com/read/80907/palu-kana-mapande-terinspirasi-dari-guru-tua/> diakses pada Senin 5 Maret 2023

Menurutnya, hadirnya program *Palu Kana Mapande* punya landasan filosofis yang sangat kuat. Ansyar mengatakan Walikota Palu saat itu punya tujuan yang sangat mulia untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik di Kota Palu. Sebagai program unggulan pemerintah saat itu, *Palu Kana Mapande* menjadi langkah taktis pemerintah untuk memajukan pendidikan di Kota Palu. Sehingga *Palu Kana Mapande* ini berbasis pada agama dan budaya.

“Kita ini tidak lama menjabat. Mungkin lewat anak-anak ini bisa jadi pahala kita nanti. Banyak dosa-dosanya kita ini. Paling tidak ini bisa jadi kita punya amal,” kata Ansyar Sutiadi menirukan ucapan Walikota Palu, Hidayat tentang program *Palu Kana Mapande*.²⁰

Ansyar menambahkan, diskusinya bersama Walikota dalam beberapa kesempatan, Walikota kala itu sering menyampaikan bahwa materi agama sewaktu mereka sekolah dulu sangat terbatas. Ada pun sekolah sore yang menjadi penunjang materi agama seperti Madrasah Diniyah, namun tidak diformalkan sehingga tidak ada penekanan untuk mengikuti belajar sore untuk materi agama.

“Berdasarkan story itu kemudian diformalkan. Inikan formal. Tambahan jam pelajaran agama. Bahkan diberi penilaian. Karena setiap tahun ada wisuda kepada anak-anak peserta didik kelas 5. Sehingga kita berharap tidak ada anak SD atau

²⁰ Ansyar Sutiadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu tahun 2016-2021 wawancara oleh penulis di Kota Palu pada 7 Desember 2022

tamatan SD yang tidak bisa baca tulis Alquran. Saya beberapa kali mendapat laporan kala itu, anak-anak sekolah negeri kita itu bersaing dengan anak-anak dari sekolah berbasis pesantren. Beberapa kali mereka bisa menjadi juara,”²¹

Kebijakan program *Palu Kana Mapande* ini menjadi intervensi langsung Pemerintah dalam dunia pendidikan. Tanpa sentuhan pemerintah pun, Ansyar menyebut pelaksanaan belajar mengajar di sekolah tetap akan terlaksana dengan baik. Hadirnya pemerintah perlu untuk memberi intervensi agar pendidikan semakin maju dan meninggalkan kesan serta ada dampaknya. Olehnya jika kebijakan *Palu Kana Mapande* menurutnya sangat sukses dalam pelaksanaannya dalam upaya intervensi mendekatkan agama kepada peserta didik. Hadirnya program *Palu Kana Mapande*, sukses mendidik paling sedikit 1000 peserta didik sekaligus mewisuda mereka yang dinyatakan layak dan mendapatkan sertifikat.

Pendidikan dilakukan dengan memfokuskan pada materi baca dan tulis Alquran. Diakui atau tidak, Ansyar menegaskan Program *Palu Kana Mapande* sukses meningkatkan pengetahuan baca tulis Alquran peserta didik. Intervensi inilah menurut Ansyar Sutiadi yang membedakan dengan antara Taman Pengajian Alquran atau TPA dengan program *Palu Kana Mapande* yang pelaksanaannya dipusatkan di sekolah. TPA, tidak bisa dilakukan intervensi agar seluruh peserta didik mengikuti TPA setiap sore. Namun dengan *Palu Kana Mapande*, secara tidak langsung, para

²¹ Ansyar Sutiadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu tahun 2016-2021 wawancara oleh penulis di Kota Palu pada 7 Desember 2022

peserta didik dipaksa untuk hadir sehingga bisa belajar agama sejak dini. Secara jujur Ansyar menjelaskan, program ini untuk membentengi anak-anak sehingga sebelum keluar dari SD sudah punya pondasi untuk bisa menulis dan membaca Alquran.

“Bayangkan 36.000 peserta didik SD. Tarolah 6.000 setiap tahun kelas 5 itu. Bagaimana memilah itu. Tidak semua di TPA. Tidak semua bisa mengaji. Jadi program ini sangat bermanfaat. Kenapa, karena kita bisa jaring anak-anak itu. Kita sudah pastikan bahwa mereka, bisa baca tulis Alquran,”.²²

Dalam mengawasi pelaksanaan program *Palu Kana Mapande* ini Ansyar menjelaskan Pemerintah Kota Palu lewat Dinas Pendidikan juga sangat serius. Seluruh UPTD aktif melakukan pemantauan hingga seleksi kepada peserta didik. Untuk memotivasi minat belajar peserta didik, dalam pelaksanaan wisuda juga dilakukan lomba untuk mengapresiasi peserta didik.

Selama program ini berlangsung sejak 2017 hingga 2021, menurutnya dampak yang terlihat sangat jelas. Pertama terjadi peningkatan iman dan taqwa peserta didik karena muatan-muatan keagamaan semakin didekatkan dengan mereka lewat intervensi di sekolah.

Secara teknis, Kepala Bidang Pembinaan SD, Yabidi menjelaskan tidak banyak daerah yang mau melakukan kebijakan seperti ini. Kebijakan ini menurutnya menambah kesibukan Dinas Pendidikan di tengah begitu banyak pekerjaan rutinitas

²² Ibid

selama ini. Dengan adanya kebijakan *Palu Kana Mapande*, pihaknya mengawal sejak awal. Mulai dari penyusunan buku materi pegangan peserta didik, bersama para pihak terkait. Sambil menyusun materi buku pegangan peserta didik, pihaknya juga melakukan perekrutan tenaga pengajar BTQ. Setelah tenaga pengajar direkrut, kemudian didistribusikan ke seluruh SD di Kota Palu. Saat pelaksanaan berlangsung, evaluasi-evaluasi pun terus dilakukan untuk disempurnakan.

Awalnya, Yabidi menjelaskan program *Palu Kana Mapande* mengalami banyak kendala. Kendala di antaranya saat berhadapan dengan orang tua peserta didik. Pada saat itu, tidak semua orang tua, siap untuk mendukung menyukseskan kegiatan ini. Hal itu lantaran, pada awal-awal pelaksanaannya, dilaksanakan saat sore hari. Artinya anak-anak pulang dulu ke rumah, lalu diantar kembali ke sekolah.

“Karena otomatis orang tua antar kembali anaknya ke sekolah. Pada saat mendekati jam asar. Karena waktu itu agar anak-anak bisa salat ashar secara berjamaah. Namun setelah kita lakukan evaluasi pelaksanaan selama dua tiga bulan. Maka yang tadinya mendekati jam 3 sampai kemudian kita ubah menjadi disambung setelah kegiatan formal di sekolah. Sehingga anak-anak keluar jam 12.15. Kegiatan ini kita lakukan di 12.30 dan sekitar jam 14.00 pelajaran sudah selesai”.²³

Dengan pengaturan jam seperti ini, orang tua dan anak menjadi lebih bisa mengikuti dan mempersiapkan diri dengan membawa bekal pada saat program *Palu*

²³ Yabidi. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Palu, wawancara oleh penulis di Kota Palu pada 6 Desember 2022.

Kana Mapande ini dilaksanakan. Setelah orang tua faham dengan kegiatan ini, Dinas Pendidikan kemudian membuat sertifikat penamatan bagi peserta didik yang telah mengikuti program *Palu Kana Mapande*. Sertifikat ini kemudian menjadi syarat untuk melanjutkan pendidikan di jenjang SMP.

Materi program *Palu Kana Mapande* ini juga terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dari yang awalnya hanya menekankan pada baca dan tulis Alquran, di tahun 2019, materinya dikembangkan hingga mencakup materi Thaharah, hafalan surah pendek, materi sejarah Islam, sejarah Nabi.

“Penambahan materi itu, tidak menambah jam pelajaran. Tinggal guru BTQnya yang mengatur. Masuk pelajaran, berdoa dulu. Zikir sebentar. Masuk hafalan. Kemudian masuk ke pembelajaran, dan sebelum ditutup ada materi-materi itu tentang kisah-kisah islam dan materi fikih,”²⁴

Penambahan materi ini mendapat sambutan yang sangat baik. Dari sekolah, para pengajar dan guru BTQ. Dalam satu program itu, selain peserta didik diajarkan tentang baca dan tulis Alquran juga diberi pengetahuan dasar tentang aqidah dan fikih.

“Pemahaman tentang fikih. Yang sederhana. Bagaimana bersuci. Yang ringan. Bagaimana berhadass yang besar. Bagaimana cara mengambil air wudhu yang benar. Bagaimana tata aturan salat yang benar. Walaupun itu mungkin saja diajarkan pada

²⁴ Yabidi. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Palu, wawancara oleh penulis di Kota Palu pada 6 Desember 2022.

posisi formal, tapi kita ingin dipraktikkan langsung. Dikatakan ini sempurna, tentu tidak. Tapi ini bukti, negara hadir di situ,”²⁵

Yabidi mengklaim begitu pentingnya ada intervensi dari pemerintah dalam program keagamaan seperti itu. Dia menjelaskan, dirinya juga pernah menjadi guru mengaji. Saat menjadi guru mengaji, kehadiran anak-anak sangat sulit untuk dikontrol. Meski guru mengaji sudah berkomunikasi dengan orang tua, tetap saja ada anak-anak yang malas hadir untuk belajar. Tapi dalam program ini, ada intervensi yang dilakukan sehingga lebih terkontrol. Kehadiran peserta didik pun jauh lebih tinggi karena ada intervensi itu.

“Karena kita bisa intervensi. Intervensi melalui sekolahnya. Sekolah melalui guru kelasnya. Guru kelasnya mengajak komunikasi dengan orang tuanya. Termasuk intervensi piagam kelulusan itu. Karena itu menjadi syarat untuk masuk ke SMP. Makanya ada semacam dorongan. Mungkin ada yang mengatakan kok masalah agama dipaksa, tapi kalau tidak dibuat begitu, yah kesian anak-anak ini. Saya melihat pada posisi, ini pemerintah daerah atau negara itu hadir dalam rangka peningkatan ketaqwaan untuk anak-anak kita. Selama ini kalau kita bicara mengaji dan keagamaan ini hanya sampai pada batas imbauan. Pemerintah Kota Palu saat itu mengintervensi

²⁵ Yabidi. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Palu, wawancara oleh penulis di Kota Palu pada 6 Desember 2022.

dengan dana. Baik untuk operasional maupun dalam rangka memberi honor terhadap 131 pengajar yang kita rekrut,”²⁶

Hal ini kata Yabidi merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Kota Palu terhadap pendidikan agama di Kota Palu dan meningkatkan pengetahuan keagamaan untuk melahirkan peserta didik yang berakhlak mulia.

Bahkan, Walikota kata itu, Hidayat menjelaskan harapannya Kota Palu dapat melahirkan peserta didik penerus bangsa yang beriman dan bertakwa. *Palu Kana Mapande* kata Hidayat diharapkan mendapat respons baik masyarakat Kota Palu sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah terhadap masyarakatnya.

“Sebagai Walikota Palu, saya menyampaikan harapan tulus agar kiranya program *Palu Kana Mapande* dapat diterima dan direspon dengan baik oleh masyarakat kota Palu, sebagai wujud dari tanggung jawab kita terhadap pendidikan yang berakhlak, berbudaya dan berkarakter,”²⁷

Dijelaskan Hidayat, Pemerintah kota Palu, memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan keagamaan untuk semua agama di seluruh Sekolah Dasar (SD) swasta dan negeri di delapan kecamatan. Walikota Palu Hidayat mengatakan bahwa upaya maksimalisasi pendidikan keagamaan itu dilakukan lewat program *Palu Kana Mapande*.

²⁶ Yabidi. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Palu, wawancara oleh penulis di Kota Palu pada 6 Desember 2022.

²⁷ Hidayat, buku pengantar pegangan peserta didik Program *Palu Kana Mapande*

Yabidi menjelaskan Program *Palu Kana Mapande* adalah program pemerintah kota Palu yang dilaunching bertepatan dengan Maulid Nabi di masjid Agung, dicetuskan program *Palu Kana Mapande* melalui kegiatan jam tambahan agama bagi semua agama, dan dikhususkan hanya untuk kelas V Sekolah Dasar, dan program ini diperuntukan bagi semua agama.

Program yang diimplementasikan dalam bentuk BTQ ini memberikan penambahan jam belajar agama bagi peserta didik kelas V Sekolah Dasar. Di samping pemberian materi pengajar al-Quran, ada materi tambahan seperti fiqih praktis, doa-doa harian dan lain-lain. Singkatnya, program ini ingin menghidupkan kembali tradisi keagamaan yang pernah ada tahun 1970 an.

Yabidi menjelaskan secara rinci, program ini dilaksanakan di 164 sekolah negeri dan swasta pada jenjang SD dari total 165 sekolah. Dari segi data, peserta didik yang beragama Islam yang pertama kali mengikuti program *Palu Kana Mapande* berjumlah 5.932 dari 164 Sekolah Dasar, dengan jumlah kebutuhan tenaga pengajar setelah dilaksanakan rekrutmen guru atau tenaga pengajar dari seleksi diperoleh 331 guru untuk semua agama, dan 296 orang khusus untuk guru BTQ.

Program yang telah dimatangkan persiapannya di tataran Dinas ini lantas diintruksikan pelaksanaannya di seluruh sekolah negeri dan swasta. Kepala Sekolah menyambut baik program *Palu Kana Mapande* ini.

Kepala SDN 24 Palu, Sahwan menjelaskan program *Palu Kana Mapande* kala itu dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Dan hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan baca dan tulis Alquran. Pelaksanaannya juga melibatkan pengajar khusus dan bukan dari guru PAI di masing-masing sekolah. BTQ kata Sahwan memang memfokuskan pembinaan baca dan tulis Alquran kepada peserta didik beragama Islam.

Bahkan bentuk dorongan nyata yang dilakukan Pemerintah untuk pelaksanaan BTQ kala itu adalah dengan pemberian sertifikat kelulusan kepada peserta didik yang menjadi syarat untuk mendaftar ke jenjang SMP.

“Sertifikatnya dibagikan kepada peserta didik setiap tahun kepada peserta didik kelas V”²⁸

Dalam sertifikat itu, ada penilaian yang diberikan kepada masing-masing peserta didik. Ada yang lulus dengan keterangan nilai sangat baik, baik, dan cukup. Sertifikat ini juga mempengaruhi peserta didik untuk semakin terdorong aktif mengikuti program BTQ yang dilakukan tiga kali seminggu.

Kepala SDN 15 Palu, Paizah menjelaskan sebelum program BTQ dilaksanakan di sekolah, ada sosialisasi yang dilakukan dan dihadiri seluruh perwakilan sekolah seKota Palu. Dalam sosialisasi itu telah dijelaskan bagaimana pelaksanaan program BTQ yang akan serentak dilakukan di SD seKota Palu itu. Saat itu juga rencana awalnya, pengajar BTQ diminta berasal dari guru honorer yang sudah mengajar di sekolah.

“Waktu itu diminta guru agama yang non ASN untuk mengajar BTQ,”²⁹

²⁸ Sahwan. Kepala SDN 24 Palu, wawancara oleh penulis di Kota Palu, pada 9 November 2022.

²⁹ Paizah. Kepala SDN 15 Palu, wawancara oleh penulis di Kota Palu, pada 16 November 2022.

Dari pantauannya, Paizah menjelaskan, program BTQ ini sangat sukses mendorong kemampuan baca dan tulis Alquran peserta didik. Selain mengajarkan cara baca dan tulis Alquran, program BTQ juga memberikan materi-materi muatan keagamaan seperti fikih dan sejarah nabi.

“Karena programnya Pak Wali waktu itu, anak-anak setelah lulus dari SD, bisa membaca Alquran,”³⁰

Dalam program selama satu tahun di kelas V itu, Paizah menilai banyak keberhasilan khususnya peningkatan kemampuan membaca Alquran yang dialami peserta didik. Peserta didik yang lulus dengan syarat mampu membaca Alquran selanjutnya sebelum naik ke kelas VI akan diberikan sertifikat dan dilakukan wisuda massal seKota Palu setiap tahun.

“Wisuda ini juga sekaligus pelombakan siswa yang mengikuti program BTQ,”³¹

Kelebihan program ini kata Paizah karena sasarannya jelas sehingga dalam pelaksanaannya semua daya dan upaya tertuju untuk mencapai sasaran yang diinginkan yakni peserta didik mampu membaca Alquran. Sehingga kata dia, memang dalam program ini, peserta didik benar-benar dipacu dalam setahun selama di kelas V belajar BTQ setiap tiga kali sehari agar mampu membaca Alquran tanpa terkecuali.

“Itu yang saya lihat. Jadi pengajarnya itu petakan mana yang sudah mampu, mana yang masih iqra, mana yang juz amma. Jadi memang untuk mencapai tujuannya jelas semua bisa membaca Alquran sebelum lulus SD,”³²

³⁰ Paizah. Kepala SDN 15 Palu, wawancara oleh penulis di Kota Palu, pada 16 November 2022.

³¹ Paizah. Kepala SDN 15 Palu, wawancara oleh penulis di Kota Palu, pada 16 November 2022.

Keunggulan lain BTQ kata Paizah adalah karena fokus pada cara membaca dan menulis Alquran sehingga tujuannya bisa dicapai dan mengukurnya jelas. Sedangkan di dalam kelas pada pembelajaran formal, tidak ada capaian khusus agar peserta didik mampu membaca Alquran. Materi yang diajarkan PAI dalam kelas sudah tersusun dalam buku teks yang harus dicapai dalam satu periode pembelajaran.

Sehingga dengan adanya BTQ ini, sasaran utama meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik dapat dicapai dalam satu tahun selama berada di kelas V.

“Bahkan ada reward dari Pak Walikota. Ada hadiah hafalan, ada yang bisa target 30 juz. Itu ada reward dari Pa Hidayat,”³³.

F. Hasil Program *Palu Kana Mapande*

Hasil program *Palu Kana Mapande* tidak dapat diukur dengan angka karena penilaiannya berbeda dengan penilaian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Namun pelaksanaan program ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan keagamaan khususnya kemampuan menulis dan membaca Alquran pada peserta didik di Kota Palu.

Program *Palu Kana Mapande* menghasilkan banyak manfaat dalam pembangunan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa. Program ini juga berhasil meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik di Kota Palu.

³²Paizah. Kepala SDN 15 Palu, wawancara oleh penulis di Kota Palu, pada 16 November 2022.

³³ Paizah. Kepala SDN 15 Palu, wawancara oleh penulis di Kota Palu, pada 16 November 2022.

Alumni SDN 24 Palu, Anafisyah Wardani mengatakan pelaksanaan BTQ yang diikutinya saat kelas 5 sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan utamanya keterampilan membaca dan menulis Alquran. Anafisyah yang ditemui di SMP N 1 Palu mengatakan, kemampuan membaca Alqurannya semakin diasah dengan mengikuti program BTQ tersebut.

“Belajar lebih semangat karena sama-sama dengan teman,”³⁴

Anafisyah menjelaskan, pembelajaran di sekolah terasa lebih mudah dipahami dan bisa diterima dibandingkan belajar di luar sekolah. Bahkan saat program pembelajaran BTQ kata dia, mereka diajari menulis surah Alfatihah, Al-Ikhlash dan mampu melakukannya.

“Menulis itu dites satu satu. Jadi bisa menulis dan membaca Alquran,”³⁵

Fisyah sapaan akrabnya menjelaskan dari yang dialaminya saat SD itu sangat membekas. Sebab hal tersebut baru pertama kali dilakukannya. Sebelumnya, Fisyah menjelaskan dia juga mengikuti Taman Pengajian Alquran (TPA) untuk belajar mengaji. Hanya saja kata dia, proses pembelajarannya berbeda. Yang paling membedakan kata Fisyah adalah di tempat mengaji, prosesnya belajarnya santri TPA yang mengaji maju satu per satu memperdengarkan bacaannya kepada Ustaz.

³⁴ Anafisyah Wardani, alumni SDN 24 Palu wawancara oleh penulis di SMP Negeri 1 Palu, 15 November 2022.

³⁵ Anafisyah Wardani, alumni SDN 24 Palu wawancara oleh penulis di SMP Negeri 1 Palu, 15 November 2022.

Jika lancar, pindah ke halaman berikutnya. Sedangkan jika tidak lancar, tetap di halaman itu untuk lebih memperlancar lagi bacaan pada halaman tersebut. Sementara, dalam proses BTQ, cara yang digunakan untuk belajar berbeda. Di sekolah, ada modul yang diberikan kepada seluruh peserta didik kelas V yang mengikuti program BTQ. Dan pembelajaran tidak monoton setiap hari maju satu per satu mendengarkan bacaannya.

Modul itu kata Fisyah berisi bacaan-bacaan singkat yang berbeda dengan iqra. Sehingga beberapa temannya yang tidak bisa mengaji, bisa dengan cepat mampu mengenali huruf hijaiyyah hingga dapat membaca huruf hijaiyyah yang ditulis bersambung. Dengan materi yang disingkat ini Fisyah menjelaskan cara belajar membaca Alquran terasa lebih berbeda dengan yang ada di TPA sehingga lebih menarik.

“Ada juga yang tidak ikut TPA waktu itu, tapi bisa mengaji setelah belajar,” jelasnya.³⁶

Senada dengan Anafisyah, Riyu Bintang juga menjelaskan belajar dalam program BTQ berbeda dengan belajar di TPA. Jika Fisyah lebih merasakan perbedaan pada cara belajar yang lebih efektif dan efisien, Riyu mengatakan semangat belajar pada program BTQ lebih tinggi dibanding dengan belajar di TPA.

³⁶ Anafisyah Wardani, alumni SDN 24 Palu wawancara oleh penulis di SMP Negeri 1 Palu, 15 November 2022.

Kata Riyu yang saat ini kelas 9 SMPN 1 Palu itu, dia merasa lebih semangat belajar mengaji dalam program BTQ dibanding di TPA.

“Alasannya di sekolah kita ketemu dengan semua teman-teman. Jadi saya lebih semangat karena semuanya teman-teman saya di sekolah”³⁷

Hal ini lanjut Riyu penting. Atmosfir belajar bersama dengan teman-teman di sekolah kata Riyu terasa lebih nyaman baginya. Ada motivasi tersendiri yang muncul karena menurut Riyu ada kompetisi untuk berlomba menjadi yang terbaik di antara teman-teman. Selain belajar membaca lquran, Riyu menjelaskan dalam program BTQ, mereka juga diajari untuk menulis Alquran. Pemahaman tentang tata cara wudhu, salat, menghafal doa-doa harian, hingga mempelajari kisah teladan Nabi.

“Kalau saya merasa beda semangatnya belajar di sekolah. Semangatnya lebih tinggi”³⁸

Riyu mengaku tidak begitu lancar membaca Alquran sebelumnya. Proses pembelajaran melalui program BTQ membantu dia untuk belajar membaca Alquran lebih semangat. Terlebih lanjut Riyu, saat itu dikatakan jika setelah program BTQ ini peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat yang menjadi salah satu syarat untuk mendaftar ke sekolah menengah pertama (SMP).

³⁷ Riyu Bintang. Alumni SDN 24 Palu. Wawancara oleh penulis di SMP N 1 Palu 15 November 2022.

³⁸ Riyu Bintang. Alumni SDN 24 Palu. Wawancara oleh penulis di SMP N 1 Palu 15 November 2022.

“Jadi semangat karena katanya kalau tidak ada sertifikat lulus tidak bisa daftar di SMP,” katanya.³⁹

Al Kahf Milano peserta didik kelas 9 SMP N 1 Palu juga mengakui program BTQ memberikan dampak terhadap peningkatan kemampuannya di bidang keagamaan. Al Kahf menerangkan, dalam pertemuan BTQ setiap 3 kali sepekan, selain mereka fokus pada materi belajar membaca dan menulis Alquran. Tutor juga mengajarkan muatan materi-materi keislaman seperti aqidah, fikih, akhlak dan sejarah islam.

Alumni SDN 24 Palu ini menjelaskan pembelajaran PAI yang dilakukan secara formal hanya dua kali dalam sepekan. Sehingga materi yang disampaikan guru PAI terbatas. Adanya program BTQ, Al Kahf menjelaskan materi-materi yang disampaikan juga materi yang praktis sehingga langsung diterapkan dalam praktik keagamaan.

Misalnya tata cara wudhu dan salat. Mereka kata Al Kahf beberapa kali melakukan praktik. Di antara praktik yang dilakukan adalah praktik wudhu dan salat. Dari praktik itu, Al Kahf menjelaskan ternyata memang ada beberapa tata cara yang dilakukan koreksi seperti cara membasuh wajah yang tepat. Cara mencuci tangan yang tepat hingga mencuci kaki yang tepat.

³⁹ Riyu Bintang. Alumni SDN 24 Palu. Wawancara oleh penulis di SMP N 1 Palu 15 November 2022.

“Waktu itu ternyata banyak yang salah. Saya ingat itu cuci muka banyak yang tidak kena semua. Ustaz bilang, itu wudhunya tidak sah kalau begitu,”⁴⁰

Tidak hanya dirasakan peserta didik, guru PAI di sekolah juga merasakan dampak pelaksanaan program BTQ ini. Gueu PAI SDN 24 Palu, Nur Hidayah A.Ma menerangkan penambahan jam pelajaran agama di luar jam formal memang perlu dilakukan. Menurutnya, tingkat pemahaman peserta didik itu berbeda-beda. Sehingga perlu ada pendalaman maupun pengulangan materi yang dilakukan untuk mencapai target pemahaman yang merata terhadap seluruh peserta didik.

“Anak-anak ini ada yang faham, ada yang sebagian faham. Ada juga yang tidak faham. Dengan ada program keagamaan di luar jam formal itu lebih bagus lagi,”⁴¹

Dari penjelasan Nurhidayah ini dipahami jika guru PAI merasa perlu dilakukan pembinaan khusus keagamaan kepada peserta didik. Hal ini untuk memberikan penguatan materi-materi keagamaan untuk menunjang jam pelajaran PAI yang hanya 2 kali seminggu pada masing-masing kelas.

Nurhidayah menambahkan, BTQ sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik, khususnya di bidang kemampuan membaca dan menulis Alquran.

⁴⁰ Al Kahf, alumni SDN 24 Palu wawancara oleh penulis di SMP N 1 Palu pada 15 November 2022

⁴¹ Nurhidayah, guru PAI SDN 24 Palu wawancara oleh penulis pada 9 November 2022.

“Anak-anak banyak yang jadi mahir membaca Alquran. Itu yang kami rasakan sebagai guru agama”⁴².

Senada dengan itu, guru PAI SD Inpres Watusampu, Sarini Hamidi mengaku ada perubahan dalam hal kemampuan baca Alquran peserta didik setelah mengikuti program BTQ. Terlebih Sarini mengaku tidak jarang saat mengajar di kelas dia meminta peserta didik untuk membaca ayat atau pun hadis yang ada di buku materi pelajaran. Hal ini terlihat di jenjang tingkat kelas 5 dan 6, seluruh peserta didik, mampu membaca ayat Alquran atau pun hadis yang diminta untuk dibaca.

“Kemampuan baca Alqurannya memang kelihatan sekali meningkat untuk kelas 5 dan 6 yang telah mengikuti BTQ,”⁴³

Meski tidak terlibat secara langsung dalam program tersebut, Sarini Hamidi menjelaskan, guru PAI juga melakukan koordinasi dengan pengajar BTQ sehingga ada saling tukar informasi antara guru PAI dengan pengajar BTQ.

“Kondisi siswa kami kan yang lebih tahu. Jadi kita tukar informasi dengan guru BTQnya. Siswa ini yang kemampuannya agak di bawah. Ini yang sedang. Ini

⁴² Nurhidayah, guru PAI SDN 24 Palu wawancara oleh penulis pada 9 November 2022

⁴³ Sarini Hamidi, guru PAI SD Inpres Watusampu, wawancara oleh penulis pada 11 November 2022.

yang mampu. Sehingga guru BTQ juga menaruh perhatian lebih untuk meningkatkan kemampuan siswa yang di bawah tadi,⁴⁴

⁴⁴ Sarini Hamidi, guru PAI SD Inpres Watusampu, wawancara oleh penulis pada 11 November 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program *Palu Kana Mapande* merupakan kebijakan Pemerintah Kota Palu di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaannya, salah satu turunan dari program *Palu Kana Mapande* adalah Baca Tulis Quran atau BTQ. Secara teknis, BTQ ini dilakukan 3 kali dalam sepekan kepada kelas V seluruh sekolah dasar negeri dan swasta. Program BTQ ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mendekatkan nilai-nilai agama kepada para peserta didik. Dengan adanya intervensi ini, artinya pemerintah hadir dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Alquran kepada generasi muda.

Program *Palu Kana Mapande* berhasil diimplementasikan dengan baik. Mulai dari perekrutan pengajar BTQ hingga pelaksanaannya di sekolah. Pertemuan BTQ dilakukan 3 kali sehari. Sasaran utama pelaksanaan BTQ adalah agar seluruh peserta didik mampu membaca Alquran dan menulisnya sebelum lulus dari jenjang SD. Selain mencapai target utama agar peserta didik mampu membaca dan menulis Alquran, dalam pengembangannya program BTQ juga mengajarkan muatan-muatan materi keagamaan seperti aqidah, fikih, akhlak dan sejarah.

Dengan program *Palu Kana Mapande* ini, pengetahuan keagamaan peserta didik mengalami peningkatan. Peningkatan itu terlihat jelas dari kemampuan membaca Alquran yang meningkat. Kemampuan menulis alquran yang kian terasa

serta pemahaman pengetahuan keagamaan lewat materi-materi yang disajikan pengajar BTQ.

Setiap tahunnya 6000 siswa kelas V yang dinyatakan lulus BTQ dan mampu membaca Alquran akan diwisuda. Ini artinya, intervensi pemerintah dalam “memaksa” peserta didik belajar membaca Alquran berhasil lewat program BTQ.

B. Saran

Program sebaiknya dijalankan seperti *Palu Kana Mapande* ini. Punya sasaran yang jelas untuk dicapai. Jangan sampai, program memiliki banyak sasaran tapi tidak satu pun sasaran itu tercapai dengan maksimal.

Melihat keberhasilan *Palu Kana Mapande* selama 2017-2021 ada beberapa saran dari penulis :

1. Program *Palu Kana Mapande* atau sejenisnya dilaksanakan kembali sebagai upaya intervensi pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan peserta didik.
2. Sasaran program dikembangkan ke minimal 2 kelas. Contoh kelas 3 dan kelas 5. Sehingga pelaksanaan di jenjang pertama kelas 2 dapat dievaluasi pada pelaksanaan kedua. Ini pun akan member kesan lebih kepada peserta didik.
3. Materi yang lebih dikembangkan selain mempelajari cara baca dan tulis Alquran juga dikembangkan memahami terjemahan Alquran. Di jenjang SD anak-anak bisa khatam membaca terjemahan Alquran, sehingga tidak hanya bisa baca bahasa Arabnya, tapi juga memahami maknanya.

4. Perlunya pelibatan sekolah yang lebih intens dalam pelaksanaan BTQ. Selama penulis meneliti, penulis menyadari kurang intensnya koordinasi antara pengajar BTQ dengan pihak sekolah utamanya guru PAI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Cet. V. Jakarta : Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta
- Awan Arif Firmansyah, Fitri. 2017. Skripsi berjudul Perbedaan Perilaku Moral dan Religius Siswa Berlatarbelakang Umum dan Siswa Berlatarbelakang Agama, Surakarta
- B. Milles, Matthew dan A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analisis, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi Rohili dengan judul Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Metode-metode Baru* Cet. I. Jakarta: UI Press.
- Bahtiar Irianto, Yoyoh. 2012. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori dan Model*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Bungin, Burhan. 2007. *Peneiltan Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Edisi. I. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Daradjat, Zakiah. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara
- Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Palu (LKPJ) tahun anggaran 2016
- Fatta, Nanang. 2014. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Cet. III, Bandung : :PT Remaja Rosdakarya
- Hadi, Amirul dan Haryono. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Hasbullah, M. 2015. *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- H.M, Arifin. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Iskandar. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Ikapi

- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Balai Pengembangan dan Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kamuskaili.blogspot.co.id/2014/04/k.html?, diakses 25 Februari 2022
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri) No.06/1975,037/U/1975, dan 36/1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Majid, Abdul dan Mudzakkir, Jusuf. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Margono. 2000. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Mandar Maju
- Muhaimin. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mujib, Abdul. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana
- Nata, Abuddin. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : kencana Prenada Media
- Nizar, Samsul. 2002. *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Rizal. 2017. Tesis berjudul *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Kota Palu*
- Rusdiana, 2015. *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi* Bandung : Pustaka Setia
- Sadi, Haliadi. Mahid, Syakir dan Syawal, Ismail. 2015. *Sejarah DPRD Kota Palu dan Gagasan Anggota Terpilih untuk pembangunan Kota Palu periode 2014-2019*. Jogjakarta : Ombak
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 21. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan. : Kompetensi dan Prakteknya*. Yogyakarta : Sinar Grafika
- Surakhmad, Winarto. 1978. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung : Torsito
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta : Rineka
- Umar, Husein. 2010. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
- Tim Penyusun. 2016. *Materi Bahan Ajar Baca Tulis Alquran tingkat Sekolah Dasar*. Palu
- Tim Penyusun Bahasa Kaili. 2003. *Kamus Bahasa Kaili Ledo-Indonesia-Inggris*, Palu : Sehati Prima Sejahtera
- Wardi, Mohammad, Ismail, dan Ali Makki yang diterbitkan tahun 2019 oleh Nidhomul Haq, vol 4, no 1
- Yunus, Mahmud. 2007. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyah

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu periode 2017-2021, Ansyar Sutiadi, S.Sos., M.Si



Wawancara Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Yabidi



Wawancara Kepala SDN 15 Palu, Paizah



Wawancara Kepala SDN 24 Palu, Sahwan



Wawancara guru PAI SD Inspres Watusampu, Sarini Hamidi



Wawancara dengan guru PAI SDN 15 Palu



Siswa yang mengikuti program BTQ



Siswa yang mengikuti program BTQ



Siswa yang mengikuti program BTQ